

**PANDEMI COVID-19 DAN ORIENTASI KERJASAMA
MULTILATERAL INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

**MUSLIM ARPAN
NIM. 170801048**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Politik

Dengan Judul :
Pandemi Covid-19 dan Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia

Disusun Oleh :

Muslim Arpan
NIM.170801048

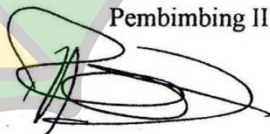
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I



Dr. Ade Irma, B.H.Sc, MA
NIP.1973092212000032004

Pembimbing II



Renaldi Safriansyah, S.E, M.HSc
NIDN. 2007017903

**PANDEMI COVID-19 DAN ORIENTASI KERJASAMA MULTILATERAL
INDONESIA**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh


MUSLIM ARPAN
NIM. 170801048

Pada Hari/ Tanggal :

Rabu, 12 Januari 2022 M
10 Jumadil Ahir 1443 H

Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

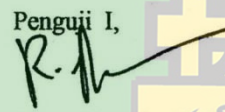
Ketua ,


Dr. Ade Irma, B.H. Sc.MA
NIP. 1973092212000032004

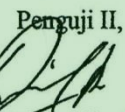
Sekretaris,


Renaldi Safriansyah, S.E, M.HSc
NIDN. 2007017903

Penguji I,


Rizkika Lhena Darwin, M.A
NIP. 198812072018032001

Penguji II,


Danil Akbar Taqwaddin, BIAM, M.Si.
NIDP. 2008048903

AR - RANIRY
Mengetahui ,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry

Darussalam – Banda Aceh




Dr. Ermita Dewi S. Ag., M.Hum
NIP. 197809172009121006

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslim Arpan
NIM : 170801048
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pandemi Covid-19 dan Orientsi Kerjasama Multilateral Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2022
Yang Menyatakan,

UIN
AR-RANIRY




Muslim Arpan

ABSTRAK

Nama : Muslim Arpan
NIM : 170801048
Fakultas/Jurusan : FISIP/ Ilmu Politik
Judul : Pandemi Covid-19 Dan Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia
Pembimbing I : Dr. Ade Irma, B.H.Sc,MA
Pembimbing II : Renaldi Safriansyah, S.E.,M.HSc

Covid-19 telah mengakibatkan terjadi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pertahanan dan aspek-aspek lainnya. Dalam menjaga stabilitas kehidupan tersebut, negara-negara di dunia termasuk Indonesia telah melakukan berbagai kerja sama, termasuk kerja sama multilateral yang sebelum dan sesudah masa Covid-19 mengalami berbagai dinamika dalam orientasinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui orientasi kerja sama multilateral Indonesia selama pandemi Covid-19 dan kerangka kerja sama multilateral yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dalam masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu jurnal, situs resmi kementerian luar negeri Indonesia, artikel dan lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan deskriptif studi, sintesis dan Analisa dokumen-dokumen resmi dari lembaga perwakilan-pemerintahan negara sahabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kerja sama Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam lembaga- lembaga kerjasama multilateral mengalami perubahan selama pandemi Covid-19, kerja sama yang internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam bingkai kerja sama multilateral cenderung pada upaya penanganan pandemi Covid-19 antara lain dengan ASEAN, WHO, IMF, PBB, Indo Pasifik dan G-20.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Orientasi, Kerja Sama Multilateral Indonesia*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pandemi Covid-19 dan Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia”**. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial, UIN Ar- Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Abdullah Sani, MA., Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan , UIN Ar- Raniry.

3. Ibu Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada ayahanda tercinta Abdul Wahab dan ibunda tercinta Siti Sarah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Bunda tersayang Siti Sarah beserta kakak-kakak ,Fitri Wahyuni dan Kayda Yanti dan adik saya Nunzil Mukmin dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang teristimewa kepada Mujiburrahman, dan seluruh angkatan 2017

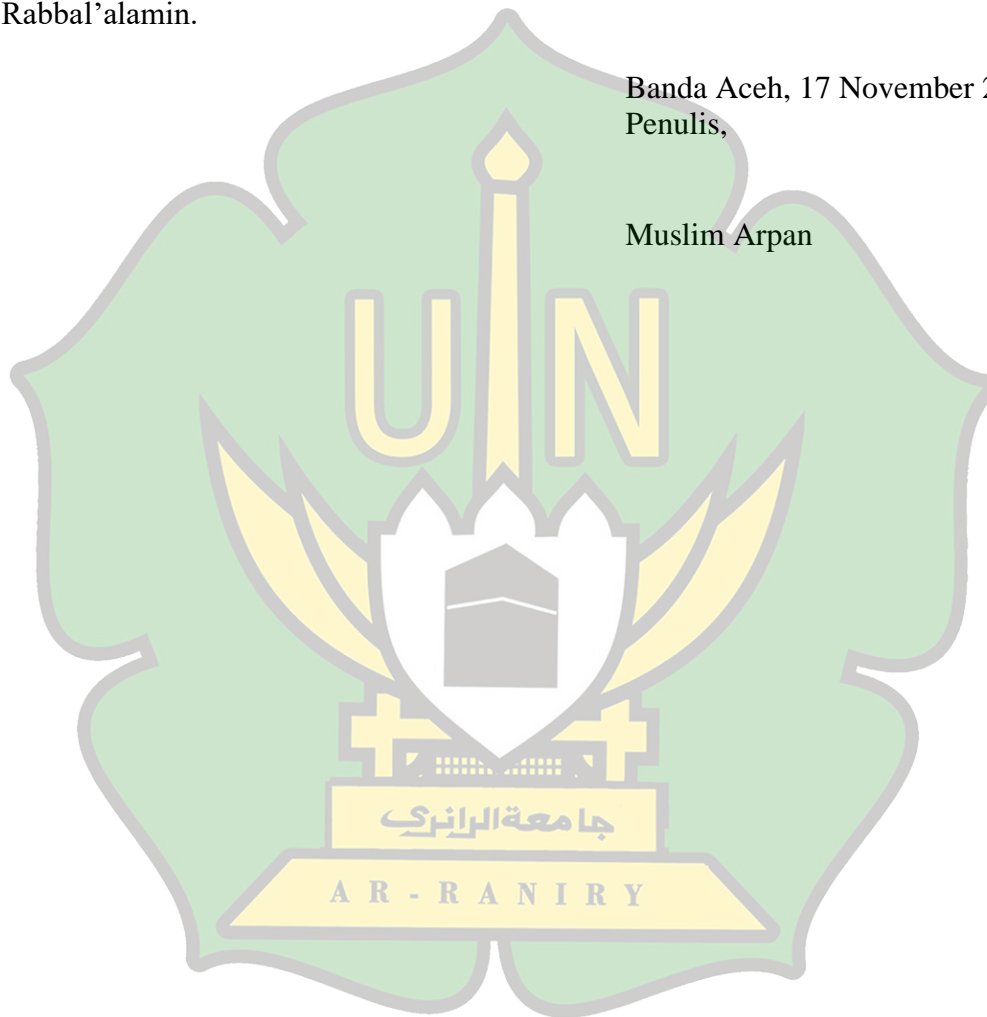
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna.

Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang

penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat Ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 17 November 2021
Penulis,

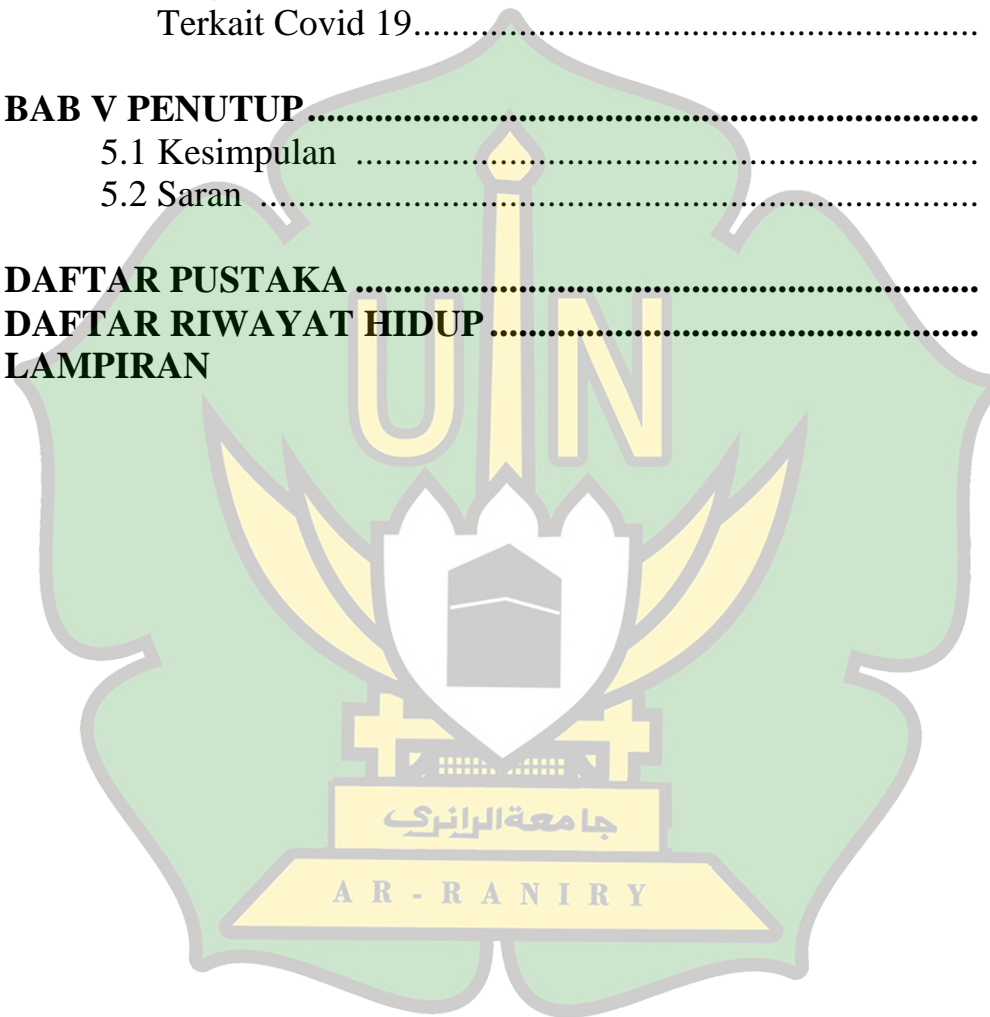
Muslim Arpan



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG	
PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Penelitian Terdahulu.....	4
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Hubungan Internasional	8
2.2 Pengertian Kerjasama Multilateral.....	15
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Multilateral.....	17
2.4 Aspek-Aspek Kerjasama Multilateral	19
2.5 Tujuan dan Manfaat Kerjasama Multilateral.....	23
2.6 Kerjasama Multilateral Indonesia	26
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
3.2 Sumber Daya.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4 Teknik Analisis Data	40
3.5 Pedomanan Penulisan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia.....	41
4.2 Kerjasama Multilateral Indonesia dalam ASEAN.....	40
4.3 Kerjasama Multilateral Indonesia dengan World Health	
4.4 Organisasi (WHO).....	48

4.5 Kerjasama Multilateral Indonesia dengan Negara-Negara G20.....	52
4.6 Kerja Sama Multilateral Indonesia dengan Negara-Negara	
4.7 Anggota PBB	55
4.8 Kerja Sama Multilateral Indonesia dengan IMF	59
4.9 Kerjasama Multilateral Indonesia dalam Indo-Pasifik Terkait Covid 19.....	62
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi *Coronavirus Diseases* 2019 (COVID-19) yang telah menjadi krisis kesehatan global menyebabkan efek domino ke berbagai sektor lain, seperti ekonomi, sosial, hingga sektor pertahanan.¹ Dampak dari pandemi Covid-19 ini tentu membuat pemerintah Indonesia melakukan perubahan orientasi kerja sama dengan negara-negara yang ada di dunia. Dengan memperhatikan sejumlah pandangan bahwa dengan bersandar kepada konsep bahwa politik luar negeri Indonesia sangat lekat dengan kepentingan nasional menghadirkan negara baik di dalam maupun di luar negeri seperti terlihat dalam kerangka kebijakan maka keselamatan warga di luar negeri menjadi perhatian serius. Demikian juga karena kepentingan domestik Indonesia juga memiliki kepentingan meningkatkan kerjasama bilateral baik di tingkat regional maupun internasional. Pengadaan vaksin Covid-19, APD dan pengaturan perbatasan bepergian antar negara dengan jalan kerjasama menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.²

Politik luar negeri Indonesia yang muncul dengan konsep melindungi penduduk sebenarnya bagian dari apa yang disebut oleh Hosti tujuan politik luar negeri untuk meraih kesejahteraan. Dengan instrumen diplomasi juga maka

¹ Marina Ika Sari, Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Masa Pandemi COVID- 19, *Jurnal Politik Volume 1 Nomor 21 tahun 2020*, h. 1.

²Asep Setiawan, Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama, *Jurnal Politik Indonesia dan Global Volume 1 Nomor 2 tahun 2020*, h. 72

kerjasama juga diarahkan untuk meraih manfaat untuk warga negaranya.³ Pandemi Covid-19 memperlihatkan semakin dibutuhkannya kerjasama multilateral untuk membangun *fair and inclusive global health governance* yaitu tata kelola kesehatan global yang adil dan inklusif serta untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia akibat pandemi ini. Bagi Indonesia, kerjasama multilateral saat ini sangat relevan untuk kerjasama pengadaan alat-alat kesehatan dan akses ke vaksin Covid-19.⁴

Covid-19 menjadi musuh bersama dan tidak ada satu kebijakan yang dapat diterapkan untuk semua negara, setiap negara mempunyai kebijakan yang terbaik untuk negaranya masing-masing. Meskipun rivalitas antar negara tetapi kerjasama bilateral dan multilateral juga tetap meningkat. Kerjasama ekonomi antar negara juga akan semakin meningkat, negara butuh untuk menggerakkan kembali ekonominya yang telah berhenti.

Fokus diplomasi Indonesia pada era pandemi Covid-19 ini adalah di bidang medis seperti diplomasi vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan serta di bidang non- medis seperti pemulihan atau evakuasi WNI, perlindungan WNI dan diseminari informasi. Bantuan dan kerjasama Indonesia dengan negara atau organisasi internasional lainnya, Indonesia telah menerima bantuan finansial dan barang seperti APD, masker dan alat tes. Selain itu Indonesia juga berusaha dan bekerja sama untuk membuat vaksin Covid-19 dengan PT. Biofarma dengan

³Holsti, K.J, *International Politics: A Framework for Analisis*. (New Jersey: Prentice-Hall International, 1992), h. 83.

⁴ <https://fisip.ui.ac.id/pandemi-covid-19-dan-tantangan-kerjasama-multilateral>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan PT. Kalbe Farma.⁵

Dalam konteks pencarian vaksin yang digencarkan Indonesia setelah munculnya Covid-19 ini ada kecenderungan pencarian dilakukan keluar negeri juga dengan cara menggandeng kerjasama bilateral. Dengan konsep bahwa politik luar negeri Indonesia menyandarkan kepada perlindungan WNI di luar negeri maka kajian ini akan mengkaji politik luar negeri semasa era Covid setidaknya sejak Januari dimana Covid dari Wuhan (China) mulai mewabah. Kajian ini berargumentasi bahwa politik luar negeri ketika wabah ini berjangkit, pertama, fokus dengan penyelamatan warga Indonesia yang berada di luar negeri. Kedua, kerja sama politik luar negeri diarahkan kepada kerjasama dalam menangani Covid-19 termasuk kolaborasi pencarian vaksin Covid-19 juga dalam konteks kepentingan menjaga keselamatan warga dari ancaman pandemi ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berjudul **“Pandemi Covid-19 dan Orientasi Kerja Sama Multilateral Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah orientasi kerja sama multilateral Indonesia selama pandemi Covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian

⁵ <https://fisip.ui.ac.id/pandemi-covid-19-dan-tantangan-kerjasama-multilateral>, diakses pada tanggal 2Maret 2021.

ini adalah untuk mengetahui orientasi kerja sama multilateral Indonesia selama pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kajian ini dapat bermanfaat:

- a. menambah wawasan pengetahuan politik sebagai serta dijadikan bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut orientasi kerja sama multilateral Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19.
- b. Memperkaya koleksi perpustakaan, khususnya pada perpustakaan F SIP UIN Ar-Raniry, sehingga dapat menyumbang perkembangan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan kerjasama multilateral Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19.

1.5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti di antaranya:

Kajian yang ditulis oleh Asep Setiawan berjudul *“Politik Luar Negeri*

Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama". Kajian ini menjelaskan bahwa politik Luar Negeri Indonesia yang merespon pandemi Covid-19 mencerminkan karakter politik luar negeri di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo yang *inward looking*. Keselamatan WNI di luar negeri menjadi alasan kebijakan luar negeri memprioritaskan kepada keselamatan mereka. Pemulangan WNI di daerah yang berbahaya pandemi Covid-19 dalam waktu sekitar lima bulan dari Maret sampai Agustus sudah mencapai lebih dari 120 ribu orang. Ini menunjukkan bahwa prioritas politik luar negeri melindungi WNI di luar negeri menjadi pendorong kebijakan luar negeri pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Namun demikian sebenarnya jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah keseluruhan WNI yang berada di luar negeri yang mencapai hampir tiga juta orang. Demikian juga jumlah tersebut mungkin tidak sebesar yang seharusnya karena juga kemampuan pemerintah yang terbatas. Namun adanya langkah penyelamatan yang dilakukan sampai lebih dari seratus ribu orang merupakan peristiwa langka dalam kondisi dunia normal.⁶

Penelitian Idil Syawfi berjudul "*Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Pasca-Liberal*". Kajian ini menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 yang mendera sistem internasional saat ini dapat dipastikan mengubah pola hubungan internasional perubahan yang nyata adalah bahwa semakin tidak efektifnya pola hubungan yang didasarkan kepada perspektif liberal yang didasarkan kepada demokrasi, interdependensi, multilateralisme, yang diharapkan dapat menciptakan kondisi hubungan yang bersifat *positif sum*.

⁶ Asep Setiawan, Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama, *Jurnal Politik Indonesia dan Global Volume 1 Nomor 2* tahun 2020, h. 72

Pergeseran yang saat ini nampak, dunia semakin memasuki pola hubungan yang bersifat zero sum, dimana negara saling berkompetisi untuk dapat memenuhi kebutuhan domestiknya masing-masing, mencoba mengurangi ketergantungan dari pihak luar, secara agresif mengamankan dirinya dari paparan dunia luar, meninggalkan institusi internasional dan pendekatan multilateral, serta melakukan tindakan-tindakan yang lebih mengarah kepada unilateralisme, yang difokuskan kepada kepentingan pribadinya. Lebarnya pergeseran ini akan sangat ditentukan kepada seberapa dalam dan seberapa lama dunia akan mengalami krisis ini, semakin cepat dan semakin dangkal akibat dari krisis ini pergeseran yang terjadi akan semakin sedikit, namun jika akibatnya lebih dalam dan dalam jangka waktu yang lebih lama, sistem internasional akan semakin menjadi arena pertarungan antar negara dalam kondisi yang bersifat *zero sum*.⁷

Penelitian Marina Ika Sari berjudul “*Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19*”. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa di masa pandemi COVID-19, pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia dengan negara-negara lain tetap dapat berjalan dengan tantangan tersendiri. Pada level strategis, pertemuan antar aktor diplomasi pertahanan tetap dapat dilaksanakan, baik melalui pertemuan secara langsung untuk pertemuan skala kecil, maupun secara virtual untuk pertemuan dalam skala besar. Kemudian, bantuan kemanusiaan juga tetap disalurkan untuk membantu negara lain yang terkena bencana alam. Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, terlihat komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan confidence building measures (CBM) dengan

⁷ Idi Syawfi, Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Paska-Liberal, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Volume 1 Nomor 2*, (Universitas Katolik Parahyangan, 2020), h. 7.

negara-negara sahabat. Namun, disisi lain, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan Indonesia, terutama pada level operasional yang mengharuskan adanya interaksi antar personel militer di lapangan, seperti penundaan sementara untuk rotasi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dan penundaan kegiatan latihan militer bersama.⁸

Kajian Sukma Susanti berjudul “*Kontestasi Negara di Tengah Pandemi Covid-19*”. Penelitian ini menyebutkan bahwa *international disease* menjadi permasalahan transnasional yang telah memperkaya kajian dalam hubungan internasional. Hal tersebut direfleksikan oleh kondisi Pandemi COVID-19 yang saat ini menjadi perhatian dunia, yang kemudian menempatkan politik dan kesehatan menjadi sebuah keniscayaan. Hal itulah yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini, untuk memberikan gambaran bahwa isu kesehatan menjadi salah satu hal yang tidak terhindarkan dari permainan kepentingan banyak negara. Studi kepustakaan memperkuat justifikasi terkait isu kesehatan dan politik internasional sebagai bagian integral dari hubungan interaksi antara aktor. Eksekusi kebijakan luar negeri mulai menggunakan isu kesehatan sebagai salah satu agenda politik di arena internasional, dan seringkali hal tersebut menciptakan persaingan antar negara. Kondisi ini didukung dengan adanya pergeseran tatanan global dalam konstelasi politik internasional sebagai implikasi dari pandemi Covid-19.

⁸ Marina Ika Sari, Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Politik Volume 1 Nomor 21 tahun 2020*.

BAB II **LANDASAN TEORITIS**

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hubungan Internasional

Hubungan Internasional berlangsung sangat dinamis, dimana berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan (alam). Pada awal proses perkembangannya, sejumlah pakar berpendapat bahwa ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Mengutip dari pendapat Schwarzenberger bahwa ilmu Hubungan Internasional merupakan bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat internasional (*sociology of International relations*).

Jadi ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan sebagainya seperti misalnya perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga), atau pertukaran budaya (*cultural exchange*).⁹

Jeremy Bentham adalah orang yang pertama kali menciptakan istilah hubungan internasional, dimana Bentham mempunyai minat yang besar terhadap hubungan antarnegara yang tumbuh dan populer pada saat ini. Sebagai suatu ilmu, hubungan internasional merupakan satu-kesatuan disiplin, dan memiliki ruang lingkup serta konsep-konsep dasar.¹⁰

Soepranto menyatakan terdapat dua sebab yang mendorong lahirnya ilmu

⁹ Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 1.

¹⁰ J. Supranto, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 32.

hubungan internasional. Kedua sebab tersebut adalah :

- a. Adanya minat yang besar terhadap fenomena yang ada setelah Perang Dunia I selesai. Fenomena tersebut banyak menarik perhatian mereka.
- b. Perang Dunia I telah banyak menelan korban manusia serta kerusakan kerusakan materiil. Melihat akibat dari Perang Dunia I tersebut timbul kesadaran betapa pentingnya kebutuhan untuk mencegah peperangan dan terselenggaranya ketertiban dunia.

Saat ini Hubungan Internasional merupakan cabang atau disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan sedang berkembang. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.¹¹

Alasan kita mempelajari hubungan internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia hidup dan tinggal didalam negara yang merdeka, secara bersama-sama negara tersebut membentuk sistem negara global (Jackson & Sorensen, 2005:40). Sedangkan yang menjadi tujuan dasar dari hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini

¹¹ Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional...*, h. 4.

bisa berwujud kerjasama, konflik, serta interaksi dalam hubungan internasional.¹²

McClelland dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hubungan Internasional juga berpendapat bahwa Hubungan Internasional adalah sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara- negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. Hubungan Internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia.¹³

Menurut T. May Rudy, dalam buku Administrasi dan Organisasi Internasional, dalam mengkaji Ilmu Hubungan Internasional dapat menggunakan berbagai pendekatan yaitu : “Ilmu dengan kajian interdisipliner, maksudnya, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari bidang ilmu-ilmu lain dalam mengembangkan kajiannya. Sepanjang menyangkut aspek internasional (hubungan/interaksi yang melintasi batas negara) adalah bidang Hubungan Internasional dengan kemungkinan berkaitan dengan ekonomi, hukum, komunikasi, politik, dan lainnya. Demikian juga untuk menelaah Hubungan Internasional dapat meminjam dan menyerap konsep konsep sosiologi, psikologi, bahkan matematika (konsep probabilitas), untuk diterapkan dalam kajian Hubungan Internasional (Rudy, 1993:3).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor

¹² Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional..* ,h. 3.

¹³ Perwita dan Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.*, h. 4.

suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi, dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis (Coulombis & Wolfe, 1986:22). Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berfikir manusia (Coulombis dan Wolfe, 1986:33).

Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan (Coulombis dan Wolfe, 1986:32). Sebagai aktor terpenting dalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, nation-state, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas.

Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:

- a. Individu-individu tertentu
- b. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
- c. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
- d. Organisasi internasional
- e. Seluruh wilayah geografis dan pengelompokkan-pengelompokkan politik

utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976: 5).

Menurut Vincensio terdapat 12 ruang lingkup yang dapat digunakan sebagai objek analisis dalam ruang lingkup hubungan internasional, yaitu:¹⁴

1. Bangsa dan Dunia

Salah satu objek kajian yang sering dibahas dan dianalisis dalam studi hubungan internasional adalah bangsa dan dunia. Mengingat bahwa setiap bangsa pasti membutuhkan kerja sama untuk bisa mewujudkan kesejahteraan. Kerja sama yang dilakukan negara dipandang dapat menumbuhkan keadilan dan perdamaian dunia. Mengapa sering digunakan sebagai objek analisis? Sebab hubungan internasional dilakukan oleh unit politik suatu negara baik secara teritorial, populasi, dan juga kewenangan yang berpengaruh terhadap konstelasi politik dunia.

2. Transnasionalisme dan Interdependensi

Transnasionalisme mengacu kepada aktor non-negara yang berpengaruh dalam studi hubungan internasional. Sementara interdependensi merupakan konsep yang menjelaskan mengenai aksi saling ketergantungan antar negara-negara di dunia dalam memenuhi kebutuhan domestik negaranya. Kondisi ini mengacu kepada situasi di mana perilaku aktor negara ditentukan oleh peristiwa eksternal dalam mekanisme hubungan timbal balik.

3. Perang dan Damai

Isu perang dan damai adalah persoalan klasik dalam studi hubungan internasional. Isu yang sering dibahas adalah penyebab perang dan resolusi

¹⁴ Vincensio, *Teori Hubungan Internasional Perspektif Klasik*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2016), h. 20 - 25

konflik.

4. Power

Merupakan elemen utama yang harus dimiliki suatu negara dalam rangka menjalankan misi politik luar negeri dan usaha pencapaian kepentingan nasional. Perilaku dasar negara dalam hubungan internasional adalah perjuangan untuk mendapatkan kekuatan sehingga membentuk pola perilaku dan interaksi.

5. Politik Internasional

Politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan dua negara atau lebih yang menitikberatkan pada perjuangan kepentingan dan upaya untuk memperoleh kekuasaan.

6. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an dan ditandai dengan diselenggarakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Swedia. Lingkungan hidup menjadi isu global karena berdampak terhadap dunia internasional, berhubungan dengan eksploitasi sumber daya global, dan selalu bersifat transnasional.

7. Kemiskinan dan Kemakmuran

Salah satu perhatian dunia terhadap isu dalam hubungan internasional adalah kemiskinan dan kemakmuran. Sehingga banyak negara berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat kesepakatan bersama seperti MDG's yang diproyeksikan untuk menyelesaikan persoalan

kemiskinan di banyak negara dan sebagai upaya mencapai *globalpeace andprosperity*.

8. Hak Asasi Manusia

Dalam hubungan internasional, HAM sering dikaitkan dengan perspektif realisme (Power politics). Fokus ini menekankan sifat manusia yang self interest dan memiliki sifat egois dalam tatanan dunia yang bersifat anarki.

9. Stabilitas Ekonomi

Merupakan kondisi yang menjadi pusat perhatian negara-negara dalam tatanan dunia. Semakin baik stabilitas ekonomi suatu negara, akan semakin baik pula kesempatan bagi negara-negara untuk menjalin kerja sama internasional.

10. Identitas dan Kedaulatan

Identitas merupakan atribut yang melekat pada aktor baik negara maupun negara yang mendorong aktor untuk bertindak dan mencapai kepentingan. Sedangkan kedaulatan berhubungan dengan pengakuan negara lain terhadap suatu negara yang juga merupakan konsep dasar dari hukum internasional dalam kerangka hubungan antar negara. Kedaulatan sering diartikan sebagai kemerdekaan dan vice versa.

11. Globalisasi

Objek yang sering dijadikan analisis dalam studi hubungan internasional yang mengacu kepada globalisasi ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pada tataran praktis, globalisasi dijadikan sebagai analisis karena

merupakan faktor pemicu dari terjadinya interdependensi dan integrasi ekonomi sebagai hasil dari kerja sama di suatu kawasan.

12. Migrasi Internasional

Merupakan isu yang menjadi tren dalam hubungan internasional karena berhubungan langsung dengan konsep HAM dan hak pencari suaka. Perpindahan penduduk antar negara dewasa ini menjadi perbincangan hangat karena migrasi internasional memberikan dampak terhadap kondisi politik domestik, ekonomi, dan juga sosial budaya.

2.2. Pengertian Kerja Sama Multilateral

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.¹⁵

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi regulasi, norma-norma dan prosedur-

¹⁵Dougherty dan Pfaltzgraff, *Contending Theoris*, (New. York : Happer and Row Publisher, 2010), h. 418

prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.^{16 17}

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama daripada dengan usaha

sendiri atau dengan persaingan.¹⁷

Dalam KBBI, multilateral artinya melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa (pihak dan sebagainya). Menurut Cambridge English Dictionary, multilateral berarti kegiatan yang melibatkan lebih dari dua kelompok atau negara. Kerja sama bentuk ini tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Kerja sama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara.

Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang beranggotakan lebih dari dua negara. Istilah multilateral dalam jalinan internasional bisa didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Anggota yang paling utama untuk kerjasama multilateral ialah negara-negara dengan kekuatan

¹⁶Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 2010), h. 21

¹⁷ Sudirman, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 6.

menengah misalnya Kanada.

Kerjasama Multilateral menurut Tamtomo (2007:100) menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dan didalamnya terdapat perjanjian yang menyangkut soal kepentingan umum yang mempunyai arti bahwa tidak terbatas mengatur kepentingan negara-negara yang mengadakan perjanjian tersebut tetapi juga menyangkut kepentingan negara lain yang tidak turut serta dalam perjanjian tersebut. Misalnya Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Liga Arab maupun PBB.

Contoh kerja sama multilateral: *United Nations* (UN) atau Persatuan Bangsa-bangsa (UN). *World Trade Center Organization* (WTO). *International Monetary Fund* (IMF) *World Bank* atau *Bank Dunia* *Economic and Social Council* (ECOSOC). Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Gerakan Non Blok (GNB).

Contoh dari organisasi didunia yang termasuk dalam kerjasama multilateral ialah WTO dan PBB. Negara-negara kecil sejatinya memiliki peranan yang juga terbatas atau sedikit kekuatan dalam urusan internasional. Namun, negara tersebut bisa berpartisipasi aktif di PBB seperti memberikan hak suara dan mengonsolidasikan dengan negara lainnya pada jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB.

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama Multilateral

Ada beberapa alasan atau mengapa negara melakukan kerjasama multilateral dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak

negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan- tindakan individu negara yang memberi dampak terhadap negara lain.^{18 19 20} Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal,

dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui multikulturalisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana

¹⁹
kesatuan diciptakan.

Suatu kerjasama internasional yang bersifat multilateral didorong oleh

¹⁸ Holsti, K.J. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. (Bandung : Bina Cipta, 2009), h. 362-363

¹⁹ Dougherty dan Pfaltzgraff, *Contending Theoris.*, h. 420.

²⁰ Shah, *Kepentingan Utama Globalisasi, The Institute of Global Justice & Lembaga Pembebasan*, (Jakarta: Media Dan Ilmu Sosial. 2004), h. 23-24

11 1. 20
 beberapa faktor:

1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan oleh suatu negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

2.4. Aspek-Aspek Kerja Sama Multilateral

Mengenai isi kerjasama antar negara yang bersifat multilateral, sebenarnya hal ini tidak bisa dibakukan mengingat isi perjanjian atau kerjasama merupakan hak dari pelaku kerjasama. Dan masing- masing kerjasama internasional pun memiliki isi atau bahasanya masing- masing. Namun biasanya ada beberapa poin yang menjadi pokok bahasan dalam kerjasama antar negara, khususnya kerjasama multilateral.

Poin-poin inilah yang sering menjadi pembicaraan para negara anggota

karena merupakan masalah umum yang banyak dialami oleh suatu negara. Biasanya dari bahasan- bahasan akan memunculkan kebijakan- kebijakan tertentu. Beberapa kebijakan yang biasanya muncul sebagai hasil dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut:^{21 22}

1. Bidang Ekonomi

Kerjasama multilateral di dunia ini kebanyakan bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Kerjasama multilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan, maupun penanaman modal. Kerja sama bidang ekonomi adalah bentuk kerja sama yang menitikberatkan pada kepentingan ekonomi negara- negara yang melakukan kerja sama. Kerja sama ekonomi ini di antaranya:

a. APEC (*Asia Pasifik Economy Corporation*),

APEC yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. APEC bermarkas di Queenstown, Singapura. Saat ini, ada 21 negara yang menjadi anggotanya. Negara anggota APEC yakni: Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

²¹ Kartasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, (Jakarta: Pustaka Remaja 2011), h. 19

²² Yusuf, Sufri. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h. 56-58

b. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa)

MEE yaitu kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kerjasama di bidang ekonomi yang merupakan pendahulu Uni Eropa. Organisasi ini berdiri dari tahun 1957 sampai 1992, ketika Traktat Maastricht menggantikan organisasi ini dengan Uni Eropaan yang memiliki wewenang dan lingkup kerja sama lebih luas. Anggota dari organisasi regional ini terdiri dari enam negara yaitu Jerman, Prancis, Luxemburg, Belanda, Italia, dan Belgia.

2. Bidang Sosial

Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama multilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Dalam bidang sosial, biasanya kerjasama ini saling memberikan bantuan ketika suatu negara mengalami bencana alam, seperti bencana tsunami, jenis gempa bumi atau sedang mengalami hal-hal tertentu yang sekiranya berhubungan dengan kemanusiaan dalam hal ini termasuk pula perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Kerja sama bidang sosial adalah bentuk kerja sama antara negara yang dilakukan dalam bidang sosial. Kerja sama sosial ini di antaranya:

a. WHO (*WorldHealth Organization*)

WHO yaitu kerja sama antara negara anggota PBB dalam bidang kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948.

b. UNICEF (*United Nations Children and Education Fund*), yaitu kerjasama antara anggota-anggota PBB dalam menangani permasalahan anak-anak.

c. ILO (*International Labour Organization*),

ILO yaitu organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan. Anggota Austria, Azerbaijan, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgia, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina.

3. Bidang Moneter

Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama multilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang moneter atau keuangan. Sebagai contoh adalah Bank

Dunia. Selain mengurus keuangan, kerjasama ini juga saling memberikan pinjaman kepada anggota yang sedang membutuhkan.

4. Kerja sama Bidang Politik dan Pertahanan

Kerja sama bidang pertahanan atau politik adalah kerja sama yang dilakukan dalam bidang pertahanan atau politik. Bentuk kerja sama ini di antaranya:

a. SEATO (*South East Asia Treaty Organization*), yaitu pakta militer yang bertujuan untuk membendung komunisme di kawasan Asia Tenggara.

Adapun anggota SEATO ialah Australia, Prancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan (termasuk Pakistan Timur, sekarang Bangladesh), Filipina, Britania Raya dan Amerika Serikat.

b. ANZUS (*Australia, New Zealand, and United States*), adalah pakta militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di kawasan Australia,

Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

- c. NATO (*North Atlantic Treaty Organization*), adalah pakta pertahanan militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di kawasan Atlantik Utara. Adapun anggota NATO terdiri dari Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Britania Raya, Denmark, Islandia, Italia dan Kanada.
- d. CENTO (*Central Treaty Organization*), adalah pakta militer yang bertujuan untuk membendung komunisme di Timur Tengah. Pakta militer ini dikenal juga dengan sebutan yang terkenal dengan Pakta Baghdad. Anggota CENTO terdiri dari Irak, Turki, Inggris, Pakistan dan Iran.

²³ Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter : Teori dan Empirikal*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2011), h. 101.

- e. Pakta Warsawa, yaitu pakta militer yang dibentuk oleh Uni Soviet untuk membendung pengaruh Amerika di Eropa Timur. Anggotanya terdiri dari Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia dan Cekoslowakia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa kerjasama multilateral memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan negara-negara yang termasuk ke dalam anggotanya di samping juga mewujudkan kesejahteraan bersama.

2.5. Tujuan dan Manfaat Kerja Sama Multilateral

Ada banyak sekali tujuan kerjasama multilateral, dan tujuan tersebut disesuaikan dengan kepentingan masing- masing organisasi. Adapun secara umum tujuan dari kerjasama multilateral adalah memajukan negara- negara

anggotanya dan bukan negara yang berada di suatu wilayah tertentu. Namun tujuan tersebut bisa dijabarkan kembali ke dalam uraian yang lebih rinci. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama multilateral antara lain sebagai berikut:²³

1. Untuk memasarkan produk negara- negara anggota
2. Untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya
3. Untuk memperoleh jaminan sosial ketika suatu saat negara mengalami kesulitan.
4. Sebagai sarana penanaman modal atau investasi dan peminjaman modal.
5. Untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara anggota.

Setiap hubungan dengan pihak lain pasti akan membawa dampak positif. Setiap dampak positif kita rasakan sebagai manfaat. Seperti halnya dengan kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan hubungan yang dapat mendatangkan banyak manfaat. Beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama multilateral antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Menambah keuntungan negara

Salah satu manfaat kerjasama multilateral adalah bertambahnya keuntungan negara. Hal ini jelas terjadi karena negara dapat memperkenalkan produk yang dihasilkan dalam negerinya kepada negara-negara tetangga yang menjadi anggota dalam kerjasama tersebut. Dengan demikian suatu negara bisa menjalin hubungan perdagangan yang lebih banyak lagi dengan pasar

²³ Yusuf, Sufri. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan Uraian tentang Pelaksanaannya..*, h. 100.

²⁴ Yusuf, Sufri. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan Uraian tentang Pelaksanaannya..*, h. 101-102

yang lebih luas. Dengan demikian keuntungan yang bisa didapatkan akan lebih banyak.

2. Mempererat hubungan antar negara

Selain menambah keuntungan negara, manfaat kerjasama multilateral yang lainnya adalah mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini seperti halnya hubungan persahabatan. Dengan menjalin kerjasama antar negara maka akan semakin banyak peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan berbagai hubungan lainnya diluar hubungan kerjasama tersebut. Apabila suatu negara sedang dilanda musibah, maka negara yang lain pun bisa memberikan bantuan.

3. Memasarkan produk dalam negeri

Seperti halnya poin teratas, manfaat kerjasama multilateral antara lain adalah untuk memasarkan produk yang dibuat lokal oleh suatu negara. Kerjasama antar negara bisa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dalam negeri supaya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian produk lokal kita akan lebih dikenal dan kemungkinan daya jualnya juga akan lebih tinggi di masyarakat luas.

4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Manfaat lain dari kerjasama multilateral adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan melakukan kerjasama multilateral, maka kita bisa lebih mudah mendapatkan barang- barang yang tidak diproduksi di dalam negeri untuk kemudian dikonsumsi di dalam negeri. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara.

5. Mudah mendapatkan pinjaman keuangan

Kerjasama multilateral di bidang moneter akan memudahkan suatu negara mendapatkan pinjaman keuangan apabila sedang membutuhkan. Hal ini karena memang organisasinya bergerak dalam bidang moneter.

6. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kerjasama multilateral akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dengan sering berkumpul dan sharing, maka suatu negara akan bisa mencontoh negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi supaya lebih maju dan juga lebih modern.²⁵

2.6. Kerja Sama Multilateral Indonesia

Hingga saat ini sudah terdapat beberapa bentuk kerja sama multilateral Indonesia dengan negara asing, yaitu:

1. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Organisasi Konferensi Islam (OKI) dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan Konferensi di Rabat, Maroko, pada tanggal 22-25 September 1969, dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan hak azasi manusia. Pembentukan OKI semula didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur Zionis membakar bagian dari Masjid suci Al-Aqsa

²⁵ Yusuf, Sufri. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan Uraian tentang Pelaksanaannya...*, h. 102

pada tanggal 21 Agustus 1969.²⁶

Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. OKI saat ini beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim di kawasan Asia dan Afrika.²⁷

Sebagai organisasi internasional yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama masalah Palestina, dalam perkembangannya OKI menjelma sebagai suatu organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan antar negara-negara muslim di seluruh dunia.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang mengemuka, negara-negara anggota OKI memandang revitalisasi OKI sebagai permasalahan yang mendesak. Semangat dan dukungan terhadap perlunya revitalisasi OKI dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur dan kinerja organisasi OKI dinilai belum efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, telah diadakan rangkaian pertemuan yang berhasil mengkaji dan melakukan finalisasi TOR restrukturisasi OKI yang disiapkan oleh Malaysia.²⁸

²⁶ Jackson dan Sorensen Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), h. 32.

²⁷ Bennet, *International Organizations: Principles and Issues*. (Prentice Hall Inc. New Jersey, 1997), h. 21.

²⁸ Jackson dan Sorensen Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional, Teori dan Pendekatan, Edisi Kelima...*, h. 32.

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (KTT) ke- 10 di Putrajaya, Malaysia, 11-17 Oktober 2003, OKI sepakat untuk memulai upaya konkrit dalam restrukturisasi Sekretariat OKI terutama pada empat aspek: perampingan struktur, metodologi, peningkatan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia. KTT Luar Biasa OKI ke-3 di Mekkah, Arab Saudi pada 78 Desember 2005 telah mengakomodir keinginan tersebut dan dituangkan dalam bentuk Macca Declaration dan OIC 10-years Program of Actions yang meliputi restrukturisasi dan reformasi OKI, termasuk perumusan Statuta OKI baru yang diharapkan dapat dilaksanakan sebelum tahun 2015.

OIC 10-years Program of Actions merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya memfokuskan pada masalah politik tetapi juga ekonomi perdagangan. Program Aksi 10 tahun OKI mencakup isu-isu politik dan intelektual, isu-isu pembangunan, sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat. Di bidang politik dan intelektual, dalam 10 tahun OKI diharapkan mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi; membasmi ekstremisme, kekerasan dan terorisme; menentang Islamophobia; meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar negara anggota, conflict prevention, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas dan komunitas muslim, dan masalah-masalah yang dialami Afrika.

Hingga 2020, anggotanya OKI yakni: Azerbaijan Yordania Afghanistan Albania Uni Emirat Arab Indonesia Uzbekistan Uganda Iran

Pakistan Bahrain Brunei-Darussalam Bangladesh Benin Burkina-Faso Tajikistan Turki Turkmenistan Chad Togo Tunisia Algeria Djibouti Arab Saudi Senegal Sudan Suriah Suriname Sierra Leone Somalia Irak Oman Gabon Gambia Guyana Guinea Guinea Bissau Palestina Comoros Kyrgyzstan Qatar Kazakhstan Kamerun Pantai Gading Kuwait Lebanon Libya Maladewa Mali Malaysia Mesir Maroko Mauritania Mozambik Niger Nigeria dan Yaman.²⁹

2. G-15

Pada KTT ke-9 Gerakan Non Blok (GNB) di Beograd bulan September 1989, 15 negara berkembang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk

Kelompok Tingkat Tinggi untuk Konsultasi dan Kerjasama Selatan-Selatan (*Summit Level Consultative Group on World Economic Crisis and Development/ SLCG*) yang kemudian lebih dikenal dengan nama G-15. Meskipun diumumkan pada kesempatan KTT GNB, G-15 secara organisasi bukan bagian dari GNB. 

G-15 bertujuan sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang terdiri dari Aljazair, Argentina, Brazil, Chile, Kolombia, India, Indonesia, Iran, Jamaika, Kenya, Malaysia, Mesir, Meksiko, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela dan Zimbabwe. G-15 diharapkan dapat mendayagunakan potensi kerjasama diantara negara berkembang. Melalui peningkatan kerjasama Selatan-Selatan tersebut pada

²⁹ Yanyan Mochamad, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 78.

gilirannya akan menunjang kredibilitas negara-negara berkembang dalam upayanya untuk mengaktifkan kembali dialog Utara-Selatan. G-15 juga dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menyampaikan kepentingan negara berkembang dalam forum G-20.

Untuk mencapai tujuannya, G15 telah mencanangkan berbagai macam proyek pembangunan dan kerjasama teknis dalam berbagai bidang antara lain di bidang perdagangan, usaha kecil dan menengah (SME's), energi, pertambangan, investasi, pembiayaan perbankan dan perdagangan, teknologi informasi, pertanian, pendidikan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia.³⁰

Pada KTT ke-3 G-15 pada tanggal 11-14 September 2006, di Havana, Cuba, telah dilakukan serah terima keketuaan G-15 dari Aljazair kepada Iran. KTT tersebut telah menyepakati sebuah Joint Communique yang memuat komitmen bersama negara-negara anggota G-15 dalam menghadapi berbagai tantangan global, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dan upaya revitalisasi dan konsolidasi internal sehingga kerjasama G15 lebih efektif dalam membantu pembangunan negara-negara anggota.

Indonesia melihat bahwa G-15 memiliki berbagai potensi dalam meningkatkan kerjasama saling menguntungkan antar negara anggotanya, antara lain karena sebagian besar negara anggota G-15 memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah, dan beberapa diantaranya merupakan negara yang tingkat ekonominya relatif sudah sangat berkembang dengan

³⁰ Yanyan Mochamad, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional ...h. 78.*

berbagai kemajuan di bidang industri, infrastruktur dan teknologi. Keuntungan G15 yang lain adalah beberapa negara anggotanya telah memiliki atau menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga negara maju seperti OECD dan G-8, maupun dengan kelompok regional lainnya yang terlibat dalam pembuatan kebijakan ekonomi global, dimana hal ini sangat menguntungkan secara ekonomi bagi kepentingan organisasi umumnya dan Indonesia khususnya. Adapun anggota G15 ialah, Aljazair, Argentina, Brasil, Chili, India, Indonesia, Iran dan Jamaika.³¹

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Namun, Sidang Majelis Umum yang pertama baru diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara. Saat ini terdapat 192 negara yang menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing.

Sejak didirikan pada tahun 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Asasi Manusia. Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan

³¹ Djelantik, S, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.

terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta menyediakan forum terhadap 192 negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Azasi Manusia, dan badan-badan serta komite-komite di dalam lingkup PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal ³³ Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.

Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB yang menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non- proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan ³² berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi mendatang.

Para anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut di antaranya ialah Prancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belgia, Bolivia, Brazil, Byelorusia (Belarusia), Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Ceko Slowakia, Denmark,

³³ Djelantik, S, *Diplomasi antara Teori dan Praktik...*, h. 64.

Republik Dominika, Ekuador, Mesir, El Salvador dan lain-lain.³³

4. Kelompok 77 dan China

Kelompok 77 dibentuk pada tanggal 15 Juni 1964 melalui pengesahan Joint Declaration dari 77 anggota negara berkembang pada saat berlangsungnya sidang Sesi Pertama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa. Sampai saat ini, Kelompok 77 dan China telah beranggotakan 133 negara.

Kelompok 77 dan China merupakan forum yang memiliki tujuan utama untuk mendorong kerjasama internasional di bidang pembangunan. Pada perkembangannya Kegiatan Kelompok 77 dan China ditujukan tidak saja untuk memberikan dorongan dan arah baru bagi pelaksanaan kerjasama Utara-Selatan di berbagai bidang pembangunan internasional, akan tetapi juga dimaksudkan untuk memperluas kerjasama dalam memantapkan hubungan yang saling menguntungkan dan saling mengisi antara sesama negara berkembang melalui Kerjasama Selatan-Selatan.

Kegiatan-kegiatan penting Kelompok 77 dan China dalam kerangka PBB terutama untuk merundingkan berbagai isu dan keputusan/resolusi yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan PBB, antara lain tindak lanjut pelaksanaan Program Aksi KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen, KTT Wanita di Beijing, Sidang Khusus SMU PBB mengenai obat-obat terlarang, modalitas penyelenggaraan Konferensi Internasional mengenai Pendanaan untuk Pembangunan, Pengkajian Tiga Tahunan Kegiatan

³³ Djelantik, S, *Diplomasi antara Teori dan Praktik...*, h. 64.

Operasional PBB untuk Pembangunan, Pelaksanaan Dialog di SMA PBB mengenai Globalisasi, Pertemuan Interim Development Committee IMF/Bank Dunia, ECOSOC, dan usulan reformasi PBB di bidang ekonomi dan sosial.

Untuk menyatukan komitmen diantara pemimpin dari negara anggota Kelompok 77 dan China, Kelompok 77 dan China memiliki Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Selatan merupakan pertemuan tertinggi di antara negara anggota Kelompok 77 dan China. KTT Selatan telah dua kali diselenggarakan yakni di ³⁵

Havana pada tahun 2000 dan di Doha pada tahun 2005.

Hasil KTT Selatan ke-2 di Doha, Qatar pada bulan Juni 2005 adalah Doha Declaration dan Doha Plan of Action. Deklarasi Doha secara umum memuat komitmen politik anggota Kelompok 77 dan China untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan antara lain isu dimensi pembangunan dalam agenda internasional, ruang kebijakan nasional, penguatan multikulturalisme, dialog antar peradaban, ketatalaksanaan yang baik, masyarakat madani, geografi baru hubungan ekonomi internasional, transfer teknologi, reformasi PBB dan

³⁵ Jusuf, B, *Kiat Diplomasi-Pengertian dan Ruang Lingkup*, (Bandung: Restu h. 16.

Agung, 2001), globalisasi. Atas usul Indonesia Deklarasi Doha juga mencantumkan New Asian African Strategic Partnership (NAASP) sebagai pengakuan pentingnya kerjasama regional dan interregional dalam mendorong Kerjasama Selatan-Selatan.

5. G20

Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 merupakan dampak dari sistem arsitektur ekonomi dan keuangan internasional yang tidak berimbang terutama dalam hal regulasi sektor keuangan yang

kurang accountable. Berawal dari krisis kredit perumahan (subprime mortgage crisis) di AS, lemahnya regulasi keuangan dan tingginya keterikatan sektor keuangan antar negara, khususnya produk derivatif keuangan, menyebabkan menjalarnya krisis negara maju ke negara berkembang lainnya. Efek domino krisis ekonomi tersebut turut menyeret sektor riil dan mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara- negara di dunia.

Krisis ekonomi serupa pernah dialami kawasan Asia tahun 1997. Namun, krisis kali ini memiliki pengaruh yang lebih besar sehingga memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh dan kerjasama negara-negara di dunia. Krisis ekonomi dan keuangan global telah menghambat proses pembangunan terutama negara Least Developed Countries serta telah menyebabkan kemunduran pencapaian MDGs.

Namun, seiring dengan diberlakukannya berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian oleh pemerintah masing-masing negara, perekonomian global telah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan awal 2010, walaupun proses recovery diprediksi masih berjalan lambat mengingat sistem finansial yang masih lemah. Proses pemulihan juga tidak akan merata dirasakan per kawasan. Selain itu, terdapat kecenderungan di perekonomian negara maju bahwa perbaikan di sektor finansial kurang sejalan paralel dengan perbaikan di sektor riil dengan salah satu indikator utama yang memprihatinkan adalah semakin meningkatnya angka pengangguran.

Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah AS berinisiatif menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (G20 Summit) bagi para

pemimpin/kepala negara G20 yang diadakan di Washington DC tanggal 15 November 2008. Krisis ekonomi global menyadarkan otoritas keuangan dan bank sentral berbagai negara bahwa integrasi sistem keuangan yang semakin erat membutuhkan adanya forum diskusi permanen yang intensif dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan global melalui upaya pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan internasional. Keanggotaan G20 terdiri dari Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Indonesia, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.

Peran Indonesia dalam setiap KTT G20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan (antara lain: usulan pembentukan global expenditure support fund, menghindari pembahasan exit strategy paket stimulus fiskal yang dapat merugikan negara berkembang, dan mendorong tercapainya konsensus selaku bridge builder). Lebih lanjut peran tersebut antara lain:³⁴

- Indonesia dapat mengedepankan pendekatan konstruktif dalam pembahasan isu di G20.
- Semangat G20 yang mendorong equity, trust building dan berorientasi solusi menjadikan forum G20 menjadi forum yang demokratis di mana semua negara mempunyai kesempatan untuk speaking on equal footing dengan negara manapun. Indonesia perlu

³⁴ Sumaryo, *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 19.

terus menjaga karakteristik dasar G20 tersebut dari desakan dominasi ataupun pengerasan sikap/posisi dari negara-negara anggota G20.

- Pergeseran posisi Indonesia dari negara Low income countries menjadi negara middle income countries serta dari negara penerima bantuan menjadi negara penerima sekaligus negara donor, membutuhkan penyesuaian profil Indonesia di dunia luar. Untuk itu, peran aktif Indonesia di G20 menjadi penting karena G20 dapat dijadikan sebagai wadah untuk instrumen politik luar negeri RI mendukung upaya Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025.
- Mengingat Indonesia mempunyai cukup banyak success stories dalam program pembangunan, partisipasi Indonesia dalam G20 dapat digunakan untuk mengedepankan pengalaman Indonesia sebagai kontribusi global Indonesia dalam pembahasan forum G20. Pada KTT Pittsburgh, misalnya, Indonesia menjadi contoh sukses pengalihan subsidi BBM tidak langsung menjadi subsidi langsung (program BLT). Indonesia dapat bekerjasama dengan Bank Dunia dan OECD untuk mengangkat berbagai success stories Indonesia.

Selama berlangsungnya krisis ekonomi global, secara umum kawasan Asia menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Beberapa negara berkembang di kawasan ini bahkan tetap dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tingkat moderat yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu, Indonesia bersama-sama negara di

kawasan Asia Pasifik, perlu terus mendorong peran penting kawasan dalam proses recovery dan pertumbuhan ekonomi global. Adapun negara anggota G20 ialah Argentina, Australia, Brazil, Canada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Britania Raya, Amerika Serikat dan Uni Eropa

6. WOC

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik sepakat untuk menyelamatkan terumbu karang di wilayah tersebut. Mekanismenya lewat kerjasama multilateral yang akan ditandatangani saat World Ocean Conference (WOC) Mei 2009 mendatang. Negara-negara tersebut yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.

Kerjasama multilateral yang disepakati di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim (UNLCC) di Bali tersebut antara lain mencakup penentuan bentang laut untuk perbaikan terumbu karang dan persoalan pendanaan yang berkelanjutan. Sebagai catatan, kerjasama multilateral itu akan melindungi 75.000 km² area terumbu karang. Termasuk didalamnya 500 spesies terumbu karang dan lebih dari 3.000 spesies ikan. Secara ekonomis, wilayah seluas itu merupakan tempat bergantung 120 juta penduduk dengan perputaran uang mencapai US\$ 2,3 miliar per tahun.³⁵

³⁵ Nafan, *Diplomasi Indonesia dalam Perundingan Doha Development Agenda - WTO; Studi Kasus: Liberalisasi Sektor Pertanian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), h. 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³⁶ Penyajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang³⁹ berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.³⁷

3.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari informasi-informasi resmi dari kementerian luar negeri Indonesia dan data informasi negara-negara sahabat serta sekretariat lembaga terkait. Sumber informasi tersebut termasuk dokumen, berita pers, rilis dan statemen-statement dari pejabat tinggi.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini juga mengumpulkan data-data melalui desktop studi yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini. Data penelitian ini bersumber dari *web based research* yaitu pengumpulan data informasi melalui website dari kedutaan besar masing-masing negara yang

³⁶ Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 4.

³⁷ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 67.

memiliki hubungan kerja sama multilateral dengan Indonesia. Data yang dikumpulkan dari *library research* deskriptif studi dengan memisahkan data, dikelompokkan dan dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, dimana setelah data dikumpulkan, kemudian dipilah-pilahkan agar data dapat tersusun secara sistematis. Kemudian dilakukan kritik untuk memperoleh data yang kredibel. Langkah selanjutnya dilakukan analisis guna memperoleh fakta-fakta terkait objek yang diteliti sehingga diperoleh satu kesimpulan tentang masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

3.5. Pedomanan Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry tahun 2019.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Orientasi Kerja Sama Multilateral Indonesia Selama Pandemi Covid-19

4.1.1. Kerja Sama Multilateral Indonesia dalam ASEAN

Kerja sama multilateral pemerintah Indonesia dalam lingkup negara-negara ASEAN terlihat dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dengan negara mitra. Dalam kerja sama ini Presiden Jokowi menekankan pentingnya stabilitas kawasan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyerukan penguatan kerjasama dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya. Komitmen kerja sama untuk mengatasi pandemi Covid-19 diperkuat dalam pertemuan para pemimpin negara ASEAN dengan pemimpin negara-negara mitra. Selain itu, masalah keamanan kawasan juga dibahas dalam rangkaian pertemuan



BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

(Sumber: <https://www.kompas.id>, diakses 20 September 2021).

Gambar 4.1

Situasi Pelaksanaan KTT ASEAN Ke 37

tersebut.⁴²

⁴² <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/11/14/pandemi-covid-19-memperkuat-kerja-sama-multilateral> -

Kerja sama multilateral Indonesia selama pandemi Covid-19 dalam lingkup ASEAN dapat terlihat dengan adanya hubungan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara adalah seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam dan lain-lain. Adapun rincian kerjasama dengan negara-negara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kerja Sama Indonesia dengan Brunei Darussalam

Adanya kerja sama Indonesia dengan negara dalam kawasan ASEAN terutama dengan Brunei Darussalam ditandai dengan pemberian bantuan kepada Brunei Darussalam dalam penanganan Covid-19. Hal ini terlihat dengan kegiatan Duta Besar RI Dr. Sujatmiko bersama Presiden Persatuan Masyarakat Indonesia Mukhidin Umar yang secara simbolis telah menyerahkan bantuan penanganan Covid-19 yang diterima oleh *Permanent Secretary* Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam yakni Haji Maswadi bin Haji Mohsin⁴³

Penyerahan bantuan berupa peralatan kesehatan senilai BND 9.438 atau sekitar Rp 100 juta dilakukan di *Menglait Sports Complex*. Selain itu, donasi dalam bentuk uang senilai BND 10.000 atau lebih dari 100 juta Rupiah telah diserahkan dua pengusaha Indonesia di Brunei Darussalam kepada *the Brunei Covid-19 Relief Fund*. Nilai donasi ini tidak banyak, tetapi itu merupakan wujud dukungan dan solidaritas masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam kepada Brunei Darussalam dalam menghadapi pandemi Covid-19. Donasi yang diberikan berupa masker, *hand sanitizer*, *Personal Protection Equipment* (PPE), kasur, kursi

⁴³ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2862/berita/bantu-brunei-hadapi-covid-19-komunitas-indonesia-di-brunei-salurkan-donasi>, diakses 21 September 2021

dan beberapa alat perlengkapan lainnya yang dikumpulkan secara bersama-sama oleh Keluarga Besar

KBRI dan masyarakat Indonesia di Brunei Darussalam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.⁴⁴

Gambar 4.2
Suasana Pemberian Bantuan Covid-19 kepada Brunei Darussalam



(Sumber: <https://kemlu.go.id/portal/id>, diakses 21 September 2021)

Menurut Dubes Sujatmiko, untuk menghadapi pandemi Covid-19 dibutuhkan kerjasama dan solidaritas yang kuat. Seluruh negara di dunia menghadapi ancaman yang sama, kolaborasi erat menjadi poin penting melewati masa pandemi. Donasi ini merupakan bentuk solidaritas Warga Negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di Brunei Darussalam. Diharapkan bantuan ini selain akan menunjukkan *gesture* eratnya hubungan antara kedua rakyat, juga dapat meringankan beban akibat Covid-19.⁴⁵

Adanya kerjasama antara Indonesia dan Brunei Darussalam ini dikarenakan Brunei Darussalam adalah negara tetangga yang hubungannya terjalin sangat hangat dan ramah. Negara sahabat yang saling mendukung dan ada di

⁴⁴ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2862/berita/bantu-brunei-hadapi-covid-19-komunitas-indonesia-di-brunei-salurkan-donasi>, diakses 21 September 2021

⁴⁵ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2862/berita/bantu-brunei-hadapi-covid-19-komunitas-indonesia-di-brunei-salurkan-donasi>, diakses 21 September 2021

waktu-waktu yang sangat dibutuhkan. Ditambah lagi terdapat sekitar 30 ribu WNI di Brunei Darussalam yang bekerja di berbagai sektor. Situasi Covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan cukup banyak warga Indonesia terpapar virus, terutama yang bekerja di restoran, catering dan cafe, bahkan di awal penyebaran Covid-19 sudah terdapat 49 WNI positif Covid-19 di Brunei Darussalam.^{46 47}

b. Kerja Sama Indonesia dengan Singapura

Indonesia dan Singapura memiliki kerja sama yang erat di berbagai bidang termasuk disaat pandemi Covid-19. Singapura baik melalui pemerintahan ataupun swasta telah membantu Indonesia dalam langkah-langkahnya mencegah penyebaran virus corona. Kerja sama ini melibatkan Yayasan Temasek Singapura dan Duta Besar Indonesia untuk Singapura Ngurah Swajaya dilakukan dengan penyerahan secara simbolik *surgical mask*⁴

Gambar 4.3. Penyerahan Bantuan oleh Singapura ke Indonesia



Sumber: <https://kemlu.go.id/portal/id>, diakses 23 September 2021

Dalam hal ini Yayasan Temasek Singapura menyerahkan 3 juta masker

⁴⁶ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2862/berita/bantu-brunei-hadapi-covid-19-komunitas-indonesia-di-brunei-salurkan-donasi>, diakses 21 September 2021

⁴⁷ <https://kemlu.go.id/portal/id/list/view/84/kerja-sama-indonesia-dan-singapura-dalam-hadapi-covid-19>, diakses 23 September 2021

untuk Kepulauan Riau, TNI dan Polri. Kerja sama yang telah terjalin membuahkan tidak hanya inisiatif bersama, tetapi juga bantuan yang telah disalurkan seperti 40.000 test kit berbasis RT PCR ke Jakarta, Bali, dan Batam, serta bantuan untuk petugas medis dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain penyerahan *surgical masker* tersebut, Singapura melalui Yayasan Temasek juga telah melakukan kerja sama lainnya, di antaranya pengadaan untuk kebutuhan dukungan non-medis Singapura untuk pembangunan sarana karantina, seperti 25 ribu set dipan dan kasur, pembelian *reusable mask* dan lain-lain.⁴⁸

Melalui kerja sama seperti ini, Dubes Ngurah Swajaya mengharapkan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan bisa ditanggulangi melalui kerja sama yang memanfaatkan potensi masing-masing negara. KBRI Singapura juga terus menawarkan pengadaan kebutuhan (*non-medical essential*) yang diperlukan Singapura serta menjajaki kerja sama memproduksi *medical supply* di Indonesia. Diharapkan akan ada kontribusi tidak hanya dalam penanggulangan Covid-19, tetapi juga untuk mendorong roda perekonomian berjalan sesuai dengan kesepakatan para pemimpin negara-negara ASEAN dan G-20 yang didorong oleh Presiden Joko Widodo.⁴⁹

C. Kerja Sama Indonesia, Malaysia dan Thailand

Kerja sama negara-negara anggota ASEAN ini pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Bagi

46

<https://kemlu.go.id/portal/id/list/view/84/kerja-sama-indonesia-dan-singapura-dalam-hadapi-covid-19>, diakses 23 September 2021

⁴⁹ <https://kemlu.go.id/portal/id/list/view/84/kerja-sama-indonesia-dan-singapura-dalam-hadapi-covid-19>, diakses 23 September 2021

Indonesia kerja

sama ini perlunya memperkuat solidaritas dan kerjasama Sub-Regional Indonesia-Malaysia-Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) untuk menanggulangi krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi) Malaysia YB Dato' Sri Mustapa Bin Mohamed, Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith, Wakil Presiden Asian Development Bank (ADB) Ahmed M. Saeed, dan Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN Dato' Lim Jock Hoi.⁴⁸

Gambar 4.4
Pertemuan Virtual Kerja Sama Multilateral Indonesia, Malaysia dan Thailand

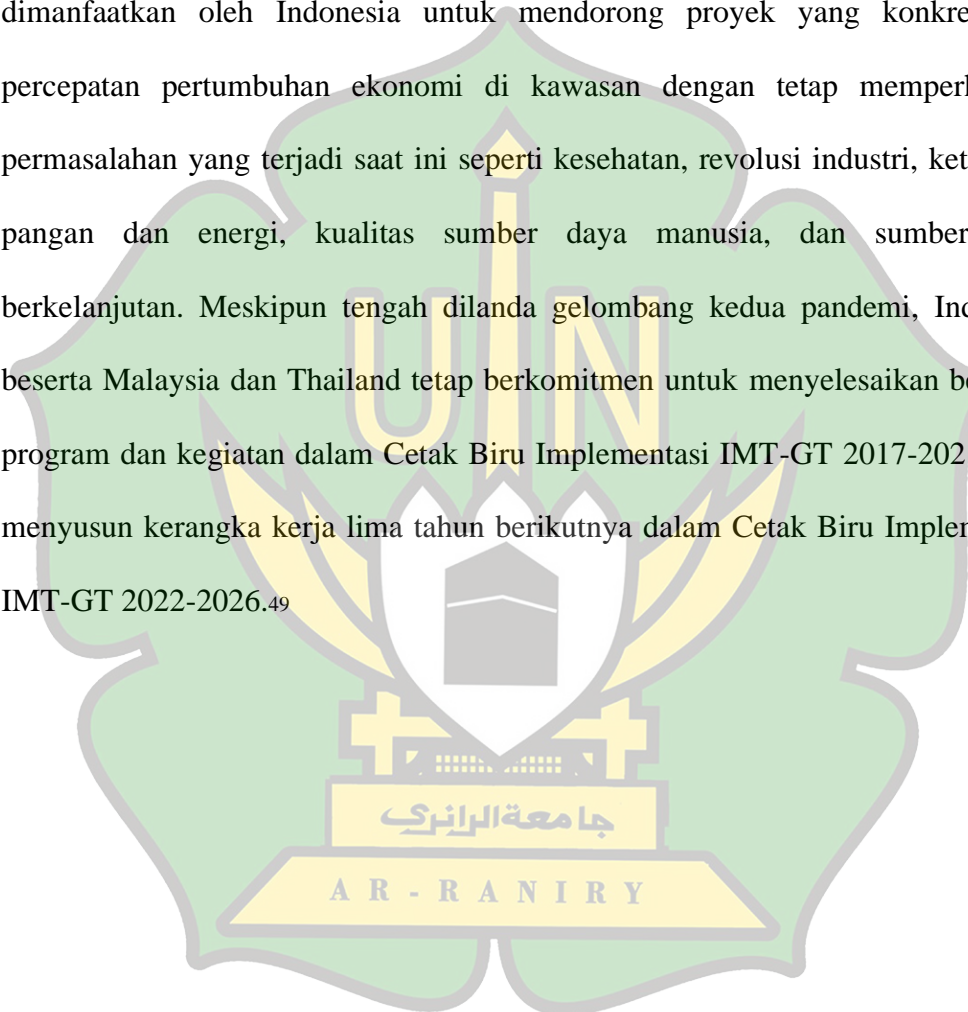


Sumber: <https://economy.okezone.com>, diakses 25 September 2021

Kerjasama IMT-GT dibentuk untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, menghilangkan kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di tiga negara. Selama 28 tahun berkiprah, telah kita saksikan bahwa kerja sama ini tetap bertahan dari berbagai guncangan ekonomi yang melanda dunia. Jadi, dalam situasi krisis pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita perlu meningkatkan solidaritas dan kerja sama untuk membantu rakyat kita keluar dari

krisis kesehatan dan ekonomi.

Airlangga melanjutkan beserta Menteri Malaysia dan Thailand telah menyepakati untuk memastikan semua target dalam kerja sama IMT-GT dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kerja sama platform IMT-GT dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendorong proyek yang konkret bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan dengan tetap memperhatikan permasalahan yang terjadi saat ini seperti kesehatan, revolusi industri, ketahanan pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya berkelanjutan. Meskipun tengah dilanda gelombang kedua pandemi, Indonesia beserta Malaysia dan Thailand tetap berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai program dan kegiatan dalam Cetak Biru Implementasi IMT-GT 2017-2021, serta menyusun kerangka kerja lima tahun berikutnya dalam Cetak Biru Implementasi IMT-GT 2022-2026.⁴⁹



Tabel 4.5
 Kerjasama Multilateral Indonesia ASEAN Sebelum dan Sesudah Covid, 19

		Sebelum Covid-19 (2016-2019)	Sesudah Covid-19 (2020 skarang)
	INFRASTRUKTUR	ASEAN mendirikan beberapa pabrik untuk kepentingan Bersama dan Mendirikan Universitas ASEAN seperti Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Pematangsiantar	
1	KEAMANAN	Penyelesaian pertikaian wilayah di Laut Cina Selatan. Membentuk Zona of Peace. Freedom and Neutrality (ZOPFAN)	(1) Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters/MLAT, (2) ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT, (3) Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan, (4) Kerja sama di bidang hukum, migrasi & kekonsuleran, kelembagaan antarpemerintah dan (5) Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan
1	EKONOMI	(1) Kerja sama yang dilakukan melalui AICO, (2) Kerja Sama di Sektor Cadangan Pangan, (3) Kerja Sama ASEAN Free Trade Area (AFTA), (4) Kerja Sama di Bidang Ekonomi Pariwisata dibentuknya Pusat Promosi ASEAN	(1) ASEAN Industrial Cooperation (AICO), (2) ASEAN Free Trade Area (AFTA), (3) Kerjasama ASEAN di sector cadangan pangan, perdagangan beras dan industri
	SOSIAL BIDAYA		(1) Perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran (upah), (2) Membantu kaum perempuan dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan; (3) Menanggulangi masalah perkembangan penduduk (4) Pengembangan sumber daya manusia; Peningkatan kesejahteraan (5) Program peningkatan kesehatan, (6) pertukaran budaya dan seni, (7) ASEAN Tourism Agreement (ATA) dan (8) penyelenggaraan pesta olahraga dua tahun sekali melalui SEA-Games
	PENDIDIKAN		(1) ASEAN Council of Teachers Convention (ACT), (2) memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas, dan (3) Olimpiade di bidang pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbandingan yang jelas orientasi kerja sama multilateral Indonesia dengan negara- asing. Dimana sebelum Covid-19 kerjasama hanya terfokus pada aspek infrastruktur, keamanan dan ekonomi. Namun pasca Covid-19 sejak tahun 2020 - 2021 bahkan sekarang kerja sama tidak hanya di bidang ketiga aspek tersebut, melainkan juga pendidikan dan sosial budaya.

4.1.2. Kerjasama Multilateral Indonesia dengan Uni Eropa dan *World Health Organization* (WHO)

Kerja sama multilateral dengan Uni Eropa dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencakup aspek kesehatan penanganan Covid-19 seperti fasilitas Kesehatan serta vaksinasi Covid-19. Hal ini dilakukan terutama dalam mendukung upaya Indonesia menangani pandemi Covid-19. Adanya kerja sama multilateral ini terlihat dengan pernyataan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia *Vincent Pilet* bahwa pihaknya telah memberikan bantuan senilai 2 juta euro untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.⁵²

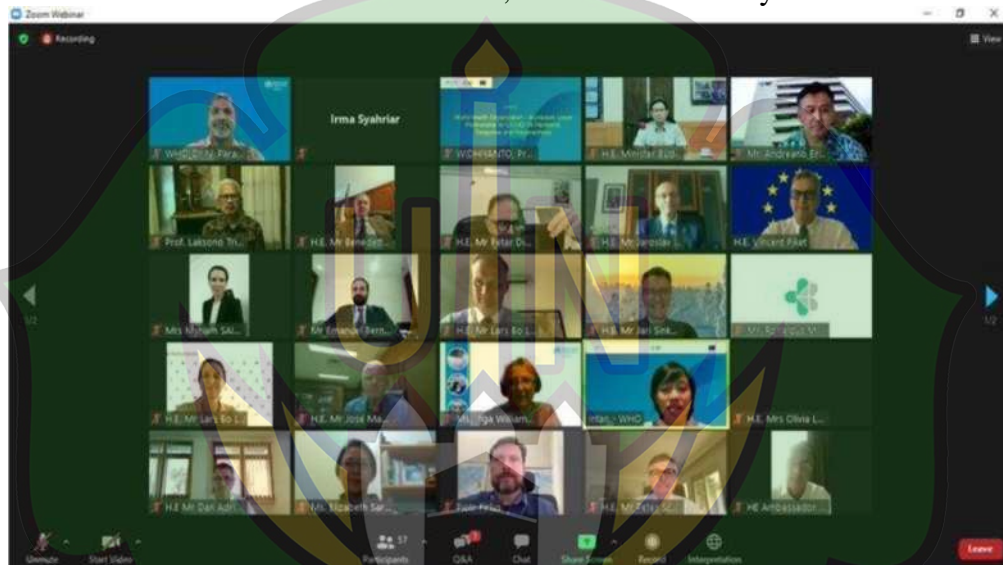
Tidak hanya memberikan bantuan terhadap Indonesia, Uni Eropa juga memberikan bantuan kepada WHO sebesar 20 juta Euro untuk penanganan pandemi di Asia tenggara. Uni Eropa juga mendukung kerjasama multilateral dengan berbagai pihak seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO, dan UNICEF agar perebakan wabah virus corona bisa teratasi dengan baik dan juga mendukung kesetaraan setiap negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19 lewat program Covid-

⁵² <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-uni-eropa-dan-who-sepakat-perkuat-kerjasama- penanganan-pandemi-covid-19/5811926.html>, diakses 30 September 2021

19 Vaccines Global Access atau CORIVAX.⁵³

Pada kesempatan yang sama, perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. Navaratna samy Paranietharan mengungkapkan kemitraan antara pemerintah Indonesia, Uni Eropa dan WHO dilakukan selain untuk memperkuat penanganan pandemi Covid-19, juga untuk memperkuat sistem dan infrastruktur kesehatan di Indonesia di masa yang akan datang.⁵⁴

Gambar 4.6
Perwakilan WHO untuk Indonesia, Dr. Navaratna samy Paranietharan



Sumber: <https://www.voaindonesia.com>, diakses 30 September 2021

Navara juga menginginkan kemitraan ini dapat meningkatkan solidaritas global, agar semua negara di dunia mendapatkan vaksin Covid-19 yang efektif dan juga aman. Adanya bantuan organisasi dunia tersebut, Indonesia melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku senang mendapatkan dukungan dari Uni Eropa dan WHO dalam upaya memerangi perebakan wabah virus corona di Indonesia.⁵⁵

⁵³ <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-uni-eropa-dan-who-sepakat-perkuat-kerjasama-penanganan-pandemi-covid-19/5811926.html>, diakses 30 September 2021

⁵⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-uni-eropa-dan-who-sepakat-perkuat-kerjasama-penanganan-pandemi-covid-19/5811926.html>, diakses 30 September 2021

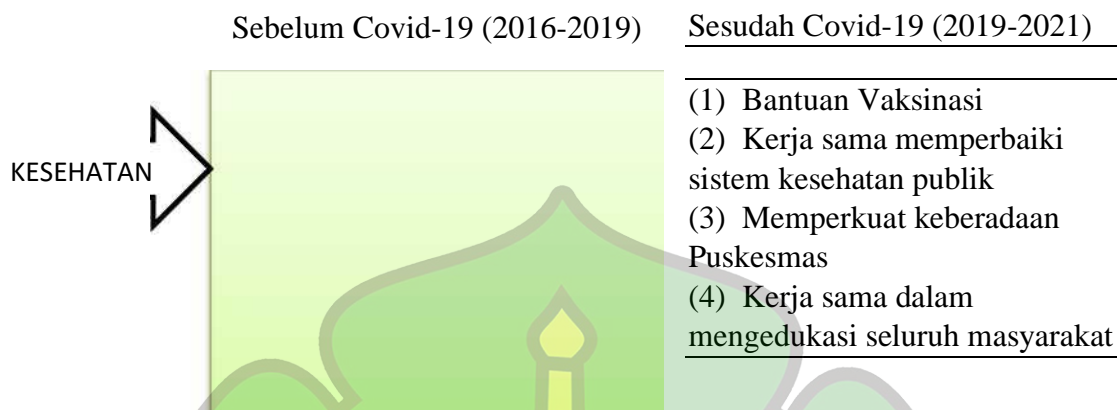
⁵⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-uni-eropa-dan-who-sepakat-perkuat-kerjasama-penanganan-pandemi-covid-19/5811926.html>, diakses 30 September 2021

Kerja sama multilateral dengan “WHO, UNICEF, dan EU tersebut membuat peningkatan kesadaran akan pentingnya standar protokol kesehatan sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia memperkuat empat pilar penanganan pandemi Covid-19 yaitu pilar diagnosis dimana pemerintah harus memperkuat kapasitas testing, pelacakan dan isolasi. Pilar kedua, adalah perawatan di mana sistem kesehatan Indonesia harus bisa menangani seseorang yang terkena virus ini dengan cepat dan tepat. Indonesia dalam hal ini cukup mengalami kemajuan yang signifikan dalam menangani pasien COVID-19 dari mulai pengobatan sampai akses yang mudah untuk mendapatkan perawatan. Pilar ketiga, adalah vaksinasi Covid-19 yang sudah dilakukan kepada kurang lebih 400.000 orang per hari. Ia mengatakan kedepannya bisa melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta orang per hari, sehingga bisa menyelesaikan vaksinasi kepada 181,5 juta orang di Indonesia pada akhir tahun ini. Pilar keempat, memperbaiki sistem kesehatan publik termasuk memperkuat keberadaan puskesmas agar bisa mengedukasi seluruh masyarakat untuk menerapkan standar protokol kesehatan yang baru.⁵⁶

kerjasama- penanganan-pandemi-covid-19/5811926.html, diakses 30 September 2021

⁵⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-uni-eropa-dan-who-sepakat-perkuat-kerjasama- penanganan-pandemi-covid-19/5811926.html>, diakses 30 September 2021

Gambar 4.8
Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WHO Sebelum dan
Setelah Covid, 19



Berdasarkan gambar 4.8 di atas, maka jelaslah bahwa kerja sama multilateral Indonesia dengan WHO terutama dalam periode 2016 - 2019 belum peneliti temukan informasi datanya, namun kerja sama itu mulai terlihat saat Covid-19 tahun 2020 hingga saat ini terutama dalam bidang bantuan Vaksinasi, kerja sama memperbaiki sistem kesehatan publik, memperkuat keberadaan Puskesmas dan kerja sama dalam mengedukasi seluruh masyarakat.

4.1.3. Kerja Sama Multilateral Indonesia dengan Negara-Negara G20.

Selama masa pandemic Covid-19 pemerintah Indonesia juga aktif mengadakan kerja sama multilateral dengan negara anggota G20. Kerja sama ini telah membuat kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi global dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan kerentanan yang terjadi guna mendorong pemulihan ekonomi global. Kesepakatan tersebut dikemukakan dalam pertemuan virtual para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Jumat, 26 Februari 2021. Negara-negara G20 menilai percepatan pelaksanaan vaksinasi serta dukungan kebijakan dengan

prioritas untuk meringankan dampak pandemi terhadap kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, khususnya UMKM, perlu dilakukan seiring dengan ketimpangan ekonomi yang terus mengalami peningkatan, baik di dalam maupun antar negara.⁵⁷

Gambar 4.9 Pertemuan Presiden Joko Widodo dalam Kerja Sama dengan Presiden Negara Anggota G20



Sumber: [tps://ekonomi.bisnis.com/read](https://ekonomi.bisnis.com/read), diakses 27 September 2021

Kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam G20 menekankan program vaksinasi penting untuk bisa berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. BI telah bersinergi dan mendukung stimulus fiskal untuk mengatasi pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi Indonesia melalui stimulus moneter berupa penurunan suku bunga kebijakan hingga sebesar 150 basis poin sejak tahun 2020 lalu. BI juga telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar 4,8 persen dari PDB dan melakukan pembelian SBN di pasar perdana sekitar 3 persen dari PDB pada

⁵⁷ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_235221.aspx, diakses 28 September 2021

2020.⁵⁶

Negara-negara G20 pun berkomitmen untuk mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi dan perluasan akses bagi UMKM, mendorong transisi menuju ekonomi yang berwawasan lingkungan dan mencapai konsensus global terkait perpajakan digital yang tertunda dari target semula di akhir 2020. Perry menambahkan, forum tersebut juga menyepakati bahwa penguatan kerjasama perlu dilakukan untuk membantu negara berpenghasilan rendah dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan utang. Selain itu, G20 meminta IMF untuk mempersiapkan proposal alokasi Special Drawing Rights (SDR) untuk negara-negara anggota guna menjaga likuiditas dan memperkuat cadangan devisa di tengah masih tingginya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.^{58 59}

Gambar 4.10

Menlu RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Jerman, Sigmar Gabriel, di Bonn





(Sumber: Kementerian Luar Negeri RI, 2017)

⁵⁸ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210228/9/1361898/g20-sepakati-penguatan-kerja-sama-tangani-pandemi-covid-19-insentif-imf-disiapkan>, diakses 27 September 2021

⁵⁹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210228/9/1361898/g20-sepakati-penguatan-kerja-sama-tangani-pandemi-covid-19-insentif-imf-disiapkan>, diakses 27 September 2021

Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia dengan G20 Sebelum dan Setelah Covid, 19

	Sebelum Covid-19 (2016-2019)	Setelah Covid-19 (2019-2021)
EKONOMI	<p>  Kerjasama dalam bidang keuangan dan ekonomi global pasca adanya krisis keuangan 2008, Retno dan Gabriel sependapat bahwa Pertemuan Menlu G20 dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan ekonomi. Fokus pembahasan Menlu G20 mengenai Maintaining Peace in a Complex World, tepat dalam berkontribusi untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan. </p>	<p>Perbaikan ekonomi global dimasa pandemi Covid-19</p>
KESEHATAN	<p>  Memperkuat kerja sama bidang sosial kemuanusiaan melalui New Asian-African Strategic Partnership (NAASP) </p>	<p>Percepatan vaksinasi dalam penanganan penyebaran varian baru virus COVID-19,</p>

Sebagaimana tampak pada Gambar 4.11 di atas, maka dapat diketahui bahwa sebelum Covid-19 orientasi kerja sama multilateral Indonesia dengan negara G20 adalah fokus pada aspek ekonomi, sedangkan setelah Covid-19 kerjasama Indonesia dengan negara G20 selain dalam bidang ekonomi juga bidang kesehatan penanganan Covid-19.

4.1.4. Kerjasama Multilateral Indonesia dengan Negara-Negara Anggota PBB

Diplomasi vaksin Indonesia ini dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan tugas utama membuka akses pasar, meratakan jalan, dan mengatasi berbagai kendala yang

muncul. Meskipun di dalam berbagai forum internasional Indonesia berulang kali menyebutkan tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap alat kesehatan seperti vaksin, namun pada kenyataannya Indonesia harus bermanuver memperjuangkan kepentingannya. Melalui pendekatan secara bilateral, diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia dalam kasus COVID-19 telah memberikan hasil nyata dan efektif.⁶⁰

Menlu Retno Marsudi telah mengunjungi banyak negara seperti China, Inggris, dan Swiss untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia. Dengan memberdayakan KBRI, Indonesia berhasil masuk dalam kelompok Advanced Market Commitment, yang berarti menerima akses vaksin 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO. Meskipun mempunyai prinsip “all vaccine for same people in some countries”, namun WHO hanya menyediakan vaksin sebatas 20 persen dari total populasi sebuah negara. Melalui pendekatan bilateral, Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Sinovac (China), Pfizer (AS), dan Astra Astrazeneca (Inggris).⁶¹

Diplomasi vaksin Indonesia secara bilateral yang utama adalah memastikan ketersediaan jatah 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO. Di samping pendekatan bilateral, Indonesia juga melakukan pendekatan pendekatan multilateral. Pendekatan multilateral sebenarnya sudah lama dilakukan Indonesia dengan cara mengintegrasikan politik luar negeri dengan isu kesehatan global. Indonesia bekerja sama dengan Afrika Selatan, Brazil,

⁶⁰ Humphrey Wangke, *Diplomasi Vaksin Indonesia Untuk Kesehatan Dunia*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021), h. 9.

⁶¹ Humphrey Wangke, *Diplomasi Vaksin Indonesia Untuk Kesehatan Dunia...*, h. 9.

Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand

membentuk Global Health and Foreign Policy Initiative (GHFPI) pada bulan September 2006 di New York.⁶²

GHFPI inilah yang kemudian mensponsori dikeluarkannya berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan penyakit menular, yaitu: Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/108 Tahun 2009 tentang pengendalian emerging infectious disease dan SDM kesehatan; Resolusi No. 65/95 Tahun 2010 tentang tata kelola global dan pencapaian MDGs; Resolusi No. 66/115 Tahun 2011 mengenai kesehatan, lingkungan hidup, dan bencana alam; Resolusi No. 67/81 Tahun 2013 mengenai Universal Health Coverage (UHC); serta Resolusi No. 68/98 Tahun 2014 mengenai kemitraan global. Semua resolusi ini baru terlihat urgensinya pada saat sekarang ketika dunia harus berhadapan dengan pandemi COVID-19.⁶³

Dalam Sidang Umum PBB ke-75 bulan September 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengusulkan pentingnya kolaborasi dan collective global leadership dalam menangani pandemi. Menindaklanjuti usulan itu, pada tanggal 14 Desember 2020 Indonesia berhasil menginisiasi lahirnya sebuah resolusi Majelis Umum PBB lainnya, yaitu "*Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All*". Melalui resolusi ini, Indonesia sangat menekankan pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan global.⁶⁴

Resolusi ini sangat sejalan dengan posisi Indonesia sebagai Ketua FPI

⁶² Humphrey Wangke, *Diplomasi Vaksin Indonesia Untuk Kesehatan Dunia...*, h. 10.

⁶³ Humphrey Wangke, *Diplomasi Vaksin Indonesia Untuk Kesehatan Dunia ..*, h. 10.

⁶⁴ Humphrey Wangke, *Diplomasi Vaksin Indonesia Untuk Kesehatan Dunia.*, h. 10.

yang aktif mendukung upaya global mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus menjadi bukti nyata kiprah Indonesia dalam memperjuangkan solidaritas internasional terkait kesehatan global, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Saat mempresentasikan resolusi dimaksud ke negara-negara anggota PBB, Indonesia menyampaikan bahwa resolusi ini meminta negara-negara anggota PBB untuk memperkuat sistem layanan kesehatan nasional yang terjangkau, membuat kebijakan inovatif terkait pembiayaan layanan kesehatan, dan tidak diskriminatif dalam mengatasi pandemi.⁶⁵

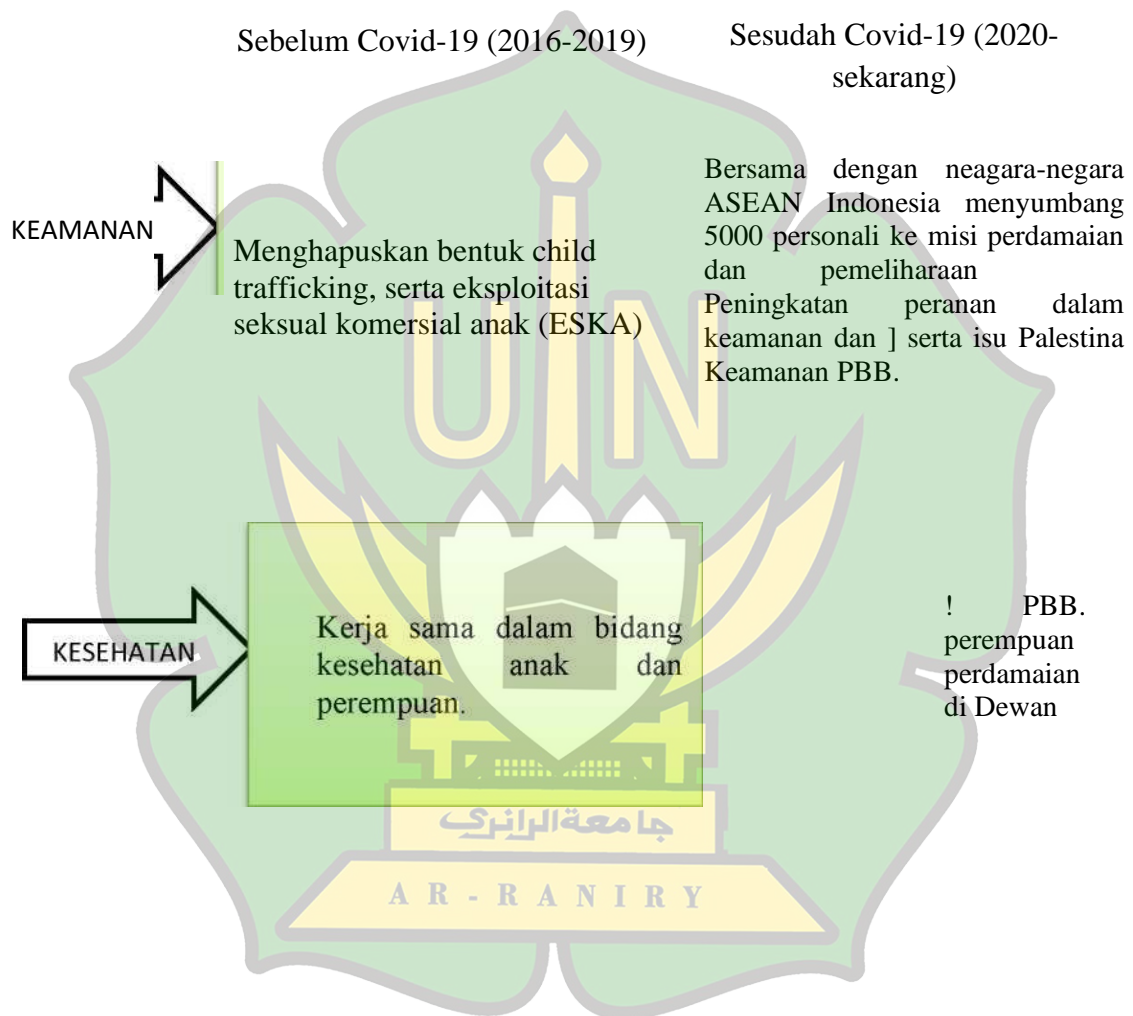
Resolusi juga mendorong pemerintah untuk bermitra dengan dunia usaha, LSM, dan kalangan akademik, termasuk apresiasi kepada tenaga kesehatan pada masa pandemi. Bagi Indonesia kerja sama kemitraan dengan semua stakeholder merupakan modal untuk bangkit bersama dari dampak pandemi Covid-19. Diplomasi semacam ini penting untuk menjaga kedaulatan dan menggerakkan perekonomian dalam negeri serta menunjukkan komitmen untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

Diplomasi Indonesia bukan hanya berhenti pada pengusulan resolusi PBB, tetapi juga aktif mengupayakan ketersediaan vaksin Covid-19 bagi semua negara dan tidak hanya dikuasai oleh negara-negara maju. Menghadapi kondisi seperti itu, DPR dapat melakukan diplomasi parlemen membantu pemerintah mendapatkan vaksin melalui berbagai forum keparlemenan internasional seperti IPU, AIPA, PUIC, APPF, dan sebagainya. Bila memang dimungkinkan, inisiasi dapat dilakukan DPR dengan membentuk wahana baru multilateral yang bersifat

⁶⁵ Humphrey Wangke, *Diplomasi Vaksin Indonesia Untuk Kesehatan Dunia ...*, h. 10.

ad hoc sebagai media interaksi antar-parlemen dalam mengatasi pandemi Covid-19.⁶⁶

Gambar 4.12
Oritensi Kerja Sama Multi Lateral Indonesia dengan PBB Sebelum dan Setelah Covid, 19



⁶⁶ Humphrey Wangke, *Diplomasi Vaksin Indonesia Untuk Kesehatan Dunia ...*, h. 11.

Kolaborasi dan collective global leadership dalam menangani pandemic Covid-19.

Berdasarkan gambar 4.12 di atas maka dapat diketahui kerjasama multilateral dengan PBB sebelum Covid-19 berorientasi pada bidang keamanan dan Kesehatan, begitu juga pasca Covid-19 terfokus pada aspek Kesehatan dan keamanan dunia.

4.1.5. Kerja Sama Multilateral Indonesia dengan IMF

Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional, baik multilateral dan regional, di samping penguatan ekonomi nasional, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global di tengah tekanan akibat Covid-19. Bank Indonesia juga mendukung implementasi respons bauran kebijakan yang terkoordinasi, baik dari sisi fiskal, moneter, dan struktural untuk memitigasi dampak Covid-19 pada ekonomi. Hal itu disampaikan pada rangkaian Pertemuan Musim Semi *International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank)* yang diselenggarakan secara virtual pada 14-16 April 2020 diikuti oleh Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari berbagai negara.⁶⁷

Pada rangkaian Pertemuan Musim Semi tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pentingnya peran bauran kebijakan di area kesehatan, fiskal dan moneter. Selain itu, peran lembaga internasional sangat penting dalam menjaga resiliensi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan global,

⁶⁷ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_223220.aspx, diakses 26 September 2021

termasuk menjaga likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi. Dalam upaya tersebut, Indonesia bersama negara G20 lainnya mendukung *G20 Action Plan* dalam menghadapi krisis yang disebabkan Covid-19 sebagai referensi respons kebijakan untuk memitigasi dampak wabah Covid-19.⁶⁸

Pertemuan tersebut juga membahas dampak merebaknya Covid-19 terhadap risiko pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi dunia menghadapi ketidakpastian terkait durasi wabah Covid-19, kemungkinan mutasi virus, dan efektivitas dari berbagai upaya menahan penyebaran virus. Risiko lain yang menjadi perhatian adalah dampak yang ditimbulkan pada sektor finansial, pasokan barang, kegiatan perdagangan, dan kepercayaan.⁶⁹

IMF memperkirakan ekonomi dunia akan kontraksi dan menekankan pentingnya respons kebijakan yang tepat untuk menghadapinya. IMF memperkirakan

⁶⁸ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_223220.aspx, diakses 26 September 2021

⁶⁹ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_223220.aspx, diakses 26 September 2021

perekonomian global tumbuh -3,0% pada 2020, turun dari 2,9% pada 2019. Selanjutnya, ekonomi global akan pulih secara bertahap dan tumbuh 5,8% pada 2021. Hal itu seiring dengan kegiatan ekonomi yang kembali normal dengan dukungan kebijakan yang telah dilakukan negara-negara anggota. Menghadapi kondisi tersebut, IMF menegaskan pentingnya upaya mengatasi Covid-19 melalui kebijakan di bidang kesehatan yang disertai dengan langkah-langkah dalam memitigasi dampak ekonomi. Langkah tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal, moneter, keuangan, kerjasama internasional (multilateral), peningkatan kepercayaan global, dan upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi.⁷⁰

Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah dan Lembaga/Instansi terkait akan terus berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam memitigasi implikasi penyebaran Covid-19 untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan.

⁷⁰ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_223220.aspx, diakses 26 September 2021

Gambar 4.13

Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia dengan IMF Sebelum dan Setelah Covid, 19

Sebelum Covid-19 (2016-2019)	Sesudah Covid-19 (2020-sekarang)
	Mendorong pertumbuhan ekonomi global masa dan pasca Covid-19 dan menetapkan langkah-langkah dalam memitigasi dampak ekonomi

KESEHATAN

Gambar 4.13 di atas menunjukkan kerja sama multilateral Indonesia dengan IMF hanya terlihat di bidang kesehatan yakni mendorong pertumbuhan ekonomi global masa dan pasca Covid-19 dan menetapkan langkah-langkah dalam memitigasi dampak ekonomi.

4.1.6. Kerjasama Multilateral Indonesia dalam Indo-Pasifik Terkait Covid-19

Presiden Trump, mengemukakan bahwa Amerika Serikat bekerja dengan rekan-rekan serta mitra-mitranya di seluruh dunia untuk mengkoordinasikan upaya-upaya kami dalam menghentikan penyebaran pandemi Covid-19. Amerika Serikat menghargai kerjasama dengan para sekutu dan mitra untuk melawan pandemi ini dan merencanakan pemulihan bersama. Selain kepemimpinan Presiden dan Menteri Luar Negeri dengan rekanan di G7, G20, ASEAN dan beberapa pihak lainnya, Deputi Menteri Luar Negeri Stephen E. Biegun telah melakukan koordinasi setingkat wakil menteri via telepon dengan para sekutu dan mitra sejak tanggal 19 Maret.⁷¹

Komunikasi ini telah memungkinkan Amerika Serikat dan mitra Indo-Pasifik kami untuk saling berbagi gagasan dan contoh terbaik guna merespon tantangan yang khusus dan kompleks yang ditimbulkan oleh pandemi global serta

⁷¹ <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-indo-pasifik-terkait-covid-19>, diakses 24 September 2021

merencanakan pembukaan kembali kegiatan ekonomi kami dengan aman, sejalan dengan kepentingan bersama kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat terus bekerja sama secara erat dengan mitra-mitra kami di Indonesia dalam upaya tanggap Covid-19 di Indonesia, dan kami berkomitmen untuk mendukung teman-teman Indonesia kami saat kita menghadapi krisis global ini.⁷²

Di Indonesia, hingga saat ini Amerika Serikat telah berkomitmen sebesar 7,3 juta dolar (113 miliar rupiah) guna mendukung upaya tanggap Covid-19 skala nasional. Program-program kami mencakup upaya percepatan mendeteksi dan melacak kasus, investasi untuk mencegah penyebaran penyakit, dan mendukung upaya menyelamatkan mereka yang sakit. Mendukung peningkatan pengujian dan pengawasan adalah salah satu prioritas utama kami, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) telah memberikan bantuan teknis untuk membantu mengembangkan strategi pengujian nasional. USAID telah memberikan bantuan senilai lebih dari 1 juta dolar untuk mendukung kapasitas laboratorium dan menyediakan suplai pengujian.⁷³

CDC, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan U.S. Association for Public Health Laboratories, mendukung pelatihan secara virtual untuk para teknisi laboratorium di seluruh penjuru negeri guna memastikan bahwa laboratorium beroperasi berdasarkan pengetahuan dan praktik pengujian yang sesuai dengan standar. Kerja sama Indo-Pasifik ini juga menghasilkan

⁷² <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-indo-pasifik-terkait-covid-19>, diakses 24 September

⁷³ <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-indo-pasifik-terkait-covid-19>, diakses 24 September 2021

kesepakatan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia melalui peningkatan komunikasi risiko dan praktik kebersihan. Melalui USAID dan CDC, pemerintah AS bermitra dengan UNICEF dan John Hopkins University untuk meningkatkan komunikasi krusial seputar Covid-19. Kemitraan kami telah menghasilkan kampanye tingkat nasional dan regional untuk meningkatkan kesadaran publik tentang penyakit ini dan mengajarkan masyarakat cara yang lebih baik untuk melindungi diri sendiri dan sesama. Melalui kolaborasi antar-mitra Indo-Pasifik, telah menghasilkan beberapa kinerja, diantaranya:⁷⁴

- a. Berhasil memulangkan puluhan ribu warga negara kami kembali ke keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, walau perbatasan negara telah ditutup dan penerbangan komersial tidak beroperasi;
- b. Memfasilitasi pemeliharaan pasokan penting peralatan perlindungan dan alat-alat kesehatan yang vital untuk memperkuat kemampuan sistem kesehatan masyarakat kami dalam memerangi pandemi;
- c. Menekankan pentingnya warga negara asing yang bekerja di sektor ekonomi yang esensial di negara kami dapat tetap bekerja;
- d. Mengidentifikasi negara-negara di Indo Pasifik yang rentan terhadap efek pandemi dan berkoordinasi bagaimana memberikan dukungan terbaik untuk mereka yang berisiko;
- e. Berkolaborasi menegakkan aturan internasional berbasis hukum dan perdamaian dan keamanan, serta melawan mereka yang berupaya mengeksploitasi pandemi untuk melemahkan prinsip-prinsip ini, termasuk

⁷⁴ <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-indo-pasifik-terkait-covid-19>, diakses 24 September

melalui disinformasi;

- f. Mendiskusikan opsi-opsi evaluasi independen terhadap wabah Covid-19 untuk mengklarifikasi fakta seputar asal usulnya, perkembangannya menjadi pandemi, dan respons WHO, untuk mencegah krisis kesehatan global di masa depan.
- g. Menegaskan kembali pentingnya berbagi informasi secara bebas, transparan, dan cepat dalam menanggapi penyakit menular;
- h. Mengidentifikasi peluang dalam pertemuan dan forum multilateral, termasuk APEC, ASEAN serta forum-forum yang terkait dengan ASEAN, G7, dan G20 guna menanggapi dan mengatasi tantangan yang ditimbulkan pandemi; dan
- i. Berbagi praktik terbaik tentang bagaimana masyarakat yang bebas dan terbuka dapat memerangi pandemi dengan tetap menegakkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

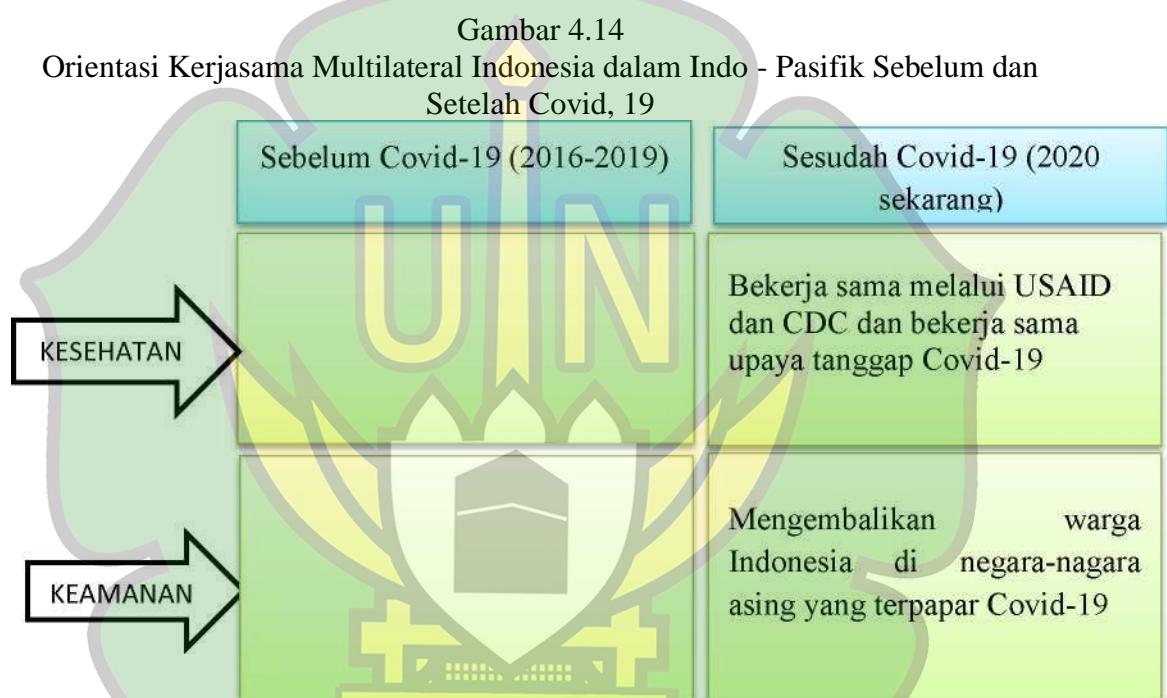
Dalam hal ini Amerika Serikat dan mitra-mitra di Indo-Pasifik akan terus berkolaborasi, melalui upaya-upaya bilateral, dengan ASEAN, APEC serta upaya multilateral lainnya untuk:⁷⁵

- a. Berbagi praktik dan pelajaran terbaik saat masyarakat, sektor usaha, serta pemerintah kita kembali bekerja;
- b. Mengurangi dampak penutupan perbatasan dan berkurangnya jaringan transportasi pada rantai pasokan global;
- c. Menjaga konektivitas penerbangan dan transportasi yang diperlukan untuk

⁷⁵ <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-indo-pasifik-terkait-covid-19>, diakses 24 September

- pergerakan penting bagi barang dan manusia, termasuk perjalanan dinas;
- d. Memperkuat ketahanan dan kesinambungan rantai pasokan regional dan global untuk berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran masyarakat internasional;
 - e. Memajukan upaya mengembangkan vaksin, diagnostik, dan terapi, dan saat telah dikembangkan nanti, memastikan bahwa mereka tersedia, bisa diakses, dan terjangkau untuk semua pihak;
 - f. Mendorong transparansi dan publikasi data kesehatan masyarakat dan informasi yang tepat waktu dengan komunitas internasional untuk mengatasi ancaman penyakit infeksi baru serta potensi ancaman kesehatan global;
 - g. Meningkatkan kemampuan institusi dan forum internasional dalam merespons pandemi dan krisis di masa depan;
 - h. Mengambil langkah untuk mendorong kembali pertumbuhan global dan kesejahteraan ekonomi;
 - i. Memimpin upaya global untuk membantu negara-negara rentan membangun ketahanan dan memiliki sumber daya untuk merespons pandemi; dan
 - j. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan tatanan internasional berbasis peraturan, bersamaan dengan menegakkan prinsip-prinsip transparansi, pertanggungjawaban dan berbagi informasi yang akurat, serta melawan upaya-upaya oleh mereka yang berusaha merusak prinsip-prinsip ini melalui disinformasi dan penggunaan paksaan.

Amerika Serikat dan mitra-mitra Indo-Pasifik kami menyambut baik koordinasi dengan para mitra dan organisasi internasional yang turut menginginkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang memungkinkan semua negara untuk makmur berdampingan sebagai negara merdeka dan berdaulat.



Berdasarkan gambar 4.14 diatas maka terlihat orientasi kerjasama Indonesia dengan negara-negara Indo - Pasifik hanya terlihat pada masa Covid-19 yakni dalam bidang kesehatan dan keamanan.

BAB V PENUTUP

4.2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi kerja sama multilateral Indonesia sebelum Covid-19 cenderung bersifat dalam bidang ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan keamanan, Namun, selama pandemi Covid-19 kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia terutama terlihat adanya kerja sama dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN baik kerja sama dalam bidang keamanan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Orientasi kerjasama multilateral Indonesia dengan G20 hanya dalam bidang ekonomi dan Kesehatan. Sedangkan kerja sama multilateral dengan negara-negara PBB hanya dilakukan pada aspek keamanan dan kesehatan. Orientasi kerjasama multilateral dalam bidang kesehatan ini dilakukan oleh Indonesia dalam rangka penanganan Covid-19.

4.3. Saran

Saran yang penulis ajukan kepada kalangan akademisi untuk terus melakukan kajian lebih lanjut terkait kerjasama Inonesia secara multilateral dengan berbagai organisasi dunia yang belum dikaji dalam penelitian ini. Sehingga menjadi bahan informasi yang lebih luas bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Setiawan, Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama, *Jurnal Politik Indonesia dan Global Volume 1 Nomor 2* tahun 2020
- CNN Indonesia. 28 Juli 2020. Empat Kerjasama Pencarian Vaksin Corona dengan China -Korsel. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200728075412-92-529590/empat-kerja-sama-pencarian-vaksin-corona-dengan-china-korsel>. Diakses 1 Juli 2021
- Detikcom. Soraya Novika. RI -Korsel Kerjasama Produksi Vaksin COVID -19. Tanggal 28 Mei 2020. <https://finance.detik.com/industri/d-5032675/ri-korsel-kerja-sama-produksi-vaksin-covid-19>. Diakses 30 Juni 2021
- Djelantik, Sukawarsini. Kerjasama Global Menangani The “Great Lockdown”; Pendekatan Diplomasi Multijalur. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. 2020.
- Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theoris*, New. York : Harper and Row Publisher, 2010
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Holsti, K.J, *International Politics: A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice- Hall International, 1992
- Holsti, K.J. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung : Bina Cipta, 2009), h. 362-363
- <https://fisip.ui.ac.id/pandemi-covid-19-dan-tantangan-kerjasama-multilateral>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.
- Idil Syawfi, Implikasi Pandemi COVID-19 terhadap Hubungan Internasional: Menuju dunia Pasca-Liberal, *Jurnal ilmu Hubungan Internasional Volume 1 Nomor 2*, Universitas Katolik Parahyangan, 2020.
- Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi internasional*, Jakarta: Pustaka Remaja 2011
- Kemlu.go.id. Perkuat Kerja Sama Bilateral Menuju Kemandirian Nasional, Menlu RI dan Meneg BUMN Kunjungi Tiongkok dan UAE. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1579/berita/perkuat-kerja-sama-bilateral-menuju-kemandirian-nasional-menlu-ri-dan-meneg-bumn-kunjungi-tiongkok-dan>-Tanggal 24 Agustus. Diakses 25 Juni 2021.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Marina Ika Sari, Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19, *Jurnal Politik Volume 1 Nomor 21 tahun 2020*
- Mas'ood, *ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 2010
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007
- Moleong Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: RosdaKarya, 2006
- Muhammad Haripin. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pandemi Covid-19*. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1369-politik-luar-negeri-indonesia-dan-pandemi-covid-19>. Diakses 22 Juni 2021
- Shah, *Kepentingan Utama Globalisasi, The Institute of Global Justice & Lembaga Pembebasan*, Jakarta: Media Dan Ilmu Sosial. 2004
- Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011
- Sudirman, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Yusuf, Sufri. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muslim Arpan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Air panas 05 Juli 1999
3. Jenis Kelamin : laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. NIM : 170801048
9. Alamat
10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : ABD Wahab
 - b. Ibu : Siti Sarah
11. Pekerjaan : Tani
12. Alamat : Air panas
13. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun : SDN 6 Putri Betung 2004-2011
 - b. Tahun : SMPN 2 Putri Betung 2011-2014
 - c. Tahun : SMAN 1 kutapanjang 2014-2017
 - d. Tahun : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, Januari 2021

Muslim Arpan

LAMPIRAN

Lampiran 1. kerjasama Multilateral Indonesia

Kerjasama Multilateral Indonesia ASEAN Sebelum dan Sesudah Covid, 19

No	Orientasi Kerjasama	Sebelum Covid-19, 2016 - 2018	Sesudah Covid-19, 2019 - 2021
	Bidang infrastruktur	1. ASEAN mendirikan beberapa pabrik untuk kepentingan bersama. (1) Pabrik pupuk ASEAN didirikan di Indonesia, (2) Pabrik pupuk urea-amoniak berlokasi di Malaysia, (3) Pabrik tembaga ASEAN dibangun di Filipina, (4) Pabrik abu soda berdiri di Thailand dan (5) Pabrik vaksin untuk penyakit Hepatitis B di Singapura 2. Mendirikan Universitas ASEAN seperti Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Pematangsiantar	
	Bidang Keamanan	1. Penyelesaian pertikaian wilayah di Laut Cina Selatan adalah salah satu bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di bidang keamanan. 2. ASEAN membentuk <i>Zone of Peace, Freedom, and Neutrality</i> yang disingkat ZOPFAN, artinya adalah Zona Bebas dan Netral. ZOPFAN ini dibentuk untuk melindungi kedaulatan dari negara-	1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters/MLAT). 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT). 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang bertujuan mempromosikan

		<p>negara anggota ASEAN.</p>	<p>perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.</p> <p>4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional.</p> <p>5. Kerjasama di bidang hukum, bidang imigrasi & kekonsuleran, kelembagaan antar parlemen.</p>
	<p>Bidang Ekonomi</p>	<p>1. Kerja sama yang dilakukan melalui AICO ini diwujudkan dengan membangun sejumlah sentra industri di beberapa negara.</p> <p>2. Kerja Sama di Sektor Cadangan Pangan</p> <p>3. Kerja Sama Melalui Kawasan Perdagangan Bebas, ASEAN Free Trade Area (AFTA)</p> <p>4. Kerja Sama di Bidang Ekonomi Pariwisata dibentuknya Pusat Promosi ASEAN</p>	<p>1. Sektor industri dilakukan melalui ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Beberapa proyek industri yang dilakukan oleh ASEAN meliputi industri pupuk yang ada di Aceh-Indonesia dan Malaysia. Kemudian pabrik industri tembaga di Filipina, produksi vaksin di Singapura, dan abu soda di Thailand. Cadangan pangan Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam terkenal sebagai lumbung padi ASEAN.</p> <p>2. Kawasan perdagangan bebas Kawasan ini disebut dengan ASEAN</p>

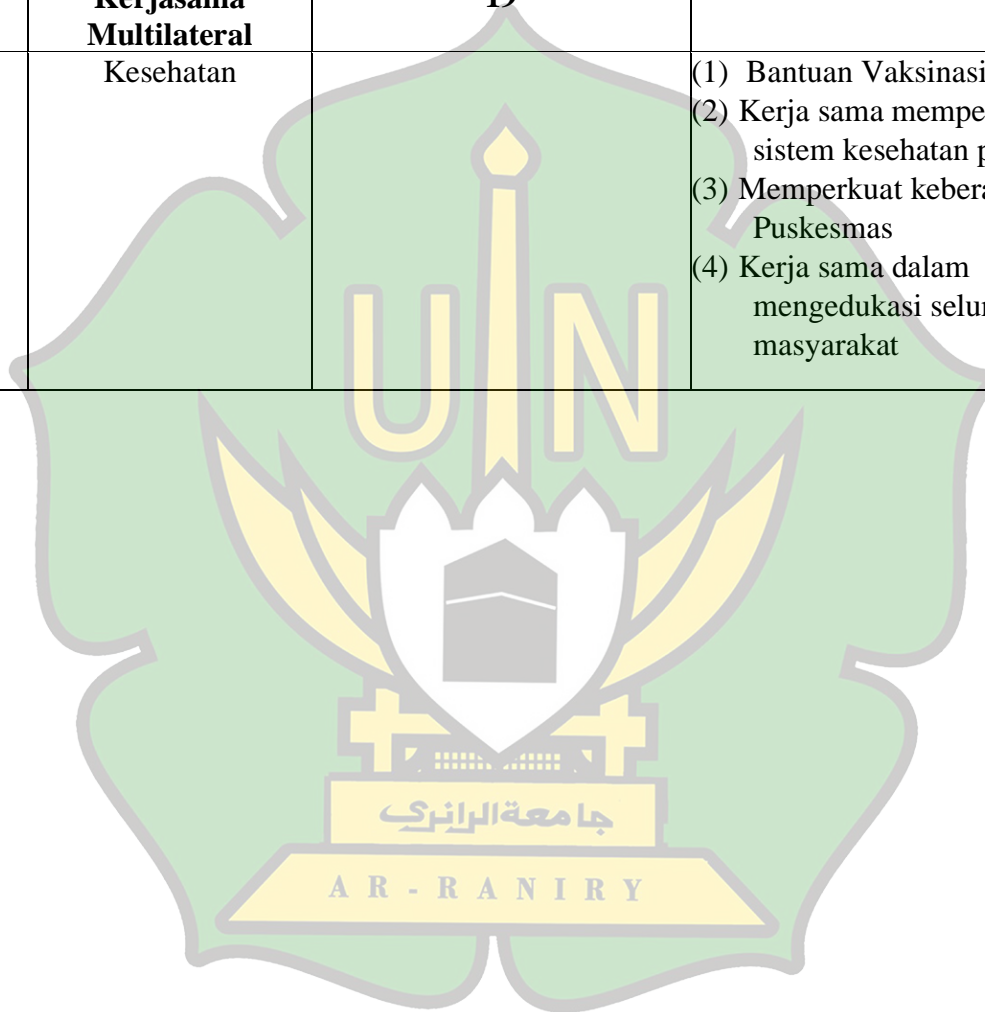
			<p>Free Trade Area (AFTA). Bentuk kerja sama negara-negara ASEAN dalam pengelolaan sektor produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN</p> <p>3. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diketahui mencakup dalam beberapa sektor, yaitu cadangan pangan, perdagangan beras dan industry</p>
	<p>Bidang sosial budaya</p>		<p>(1) Pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran (upah) yang wajar</p> <p>(2) Membantu kaum perempuan dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan;</p> <p>(3) Menanggulangi masalah masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan badan internasional yang bersangkutan;</p> <p>(4) Pengembangan sumber daya manusia; Peningkatan kesejahteraan;</p> <p>(5) Program peningkatan kesehatan (makanan dan obat-obatan);</p> <p>(6) Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN;</p> <p>(7) Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN (ASEAN Tourism Agreement)</p>

			(ATA)). (8) Penyelenggaraan pesta olahraga dua tahun sekali melalui SEA-Games
	Bidang Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. ASEAN Council of Teachers Convention (ACT) di Sanur, Denpasar, Sabtu (8/12/2012), dengan tema ASEAN Community 2015: Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. 2. ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN-Japan Scholarship Fund (Dana Beasiswa ASEAN-Jepang). 3. Olimpiade di bidang pendidikan sering digelar di level regional Asia Tenggara. Contoh: Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2015.

Lampiran 2. kerja Sama Multi Lateral Indonesia

Oritensi Kerjasama Multilateral Indonesia dengan WHO Sebelum dan Setelah Covid, 19

No	Orientasi Kerjasama Multilateral	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
1	Kesehatan		(1) Bantuan Vaksinasi (2) Kerja sama memperbaiki sistem kesehatan publik (3) Memperkuat keberadaan Puskesmas (4) Kerja sama dalam mengedukasi seluruh masyarakat



Lampiran 3. kerjasama Multilateral Indonesia

Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia dengan G20 Sebelum dan Setelah Covid, 19

No	Orientasi Kerjasama Multilateral	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
1	Bidang ekonomi tahun 2020	Kerjasama dalam bidang keuangan dan ekonomi global pasca adanya krisis keuangan 2008, Retno dan Gabriel sependapat bahwa Pertemuan Menlu G20 dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan ekonomi. Fokus pembahasan Menlu G20 mengenai <i>Maintaining Peace in a Complex World</i> , tepat dalam berkontribusi untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pembangunan.	Perbaikan ekonomi global di masa pandemi Covid-19
2	Bidang Kesehatan tahun 2020		Percepatan vaksinasi dalam penanganan penyebaran varian baru virus COVID-19,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4. kerjasama Multilateral Indonesia

Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia dengan PPB Sebelum dan Setelah Covid, 19

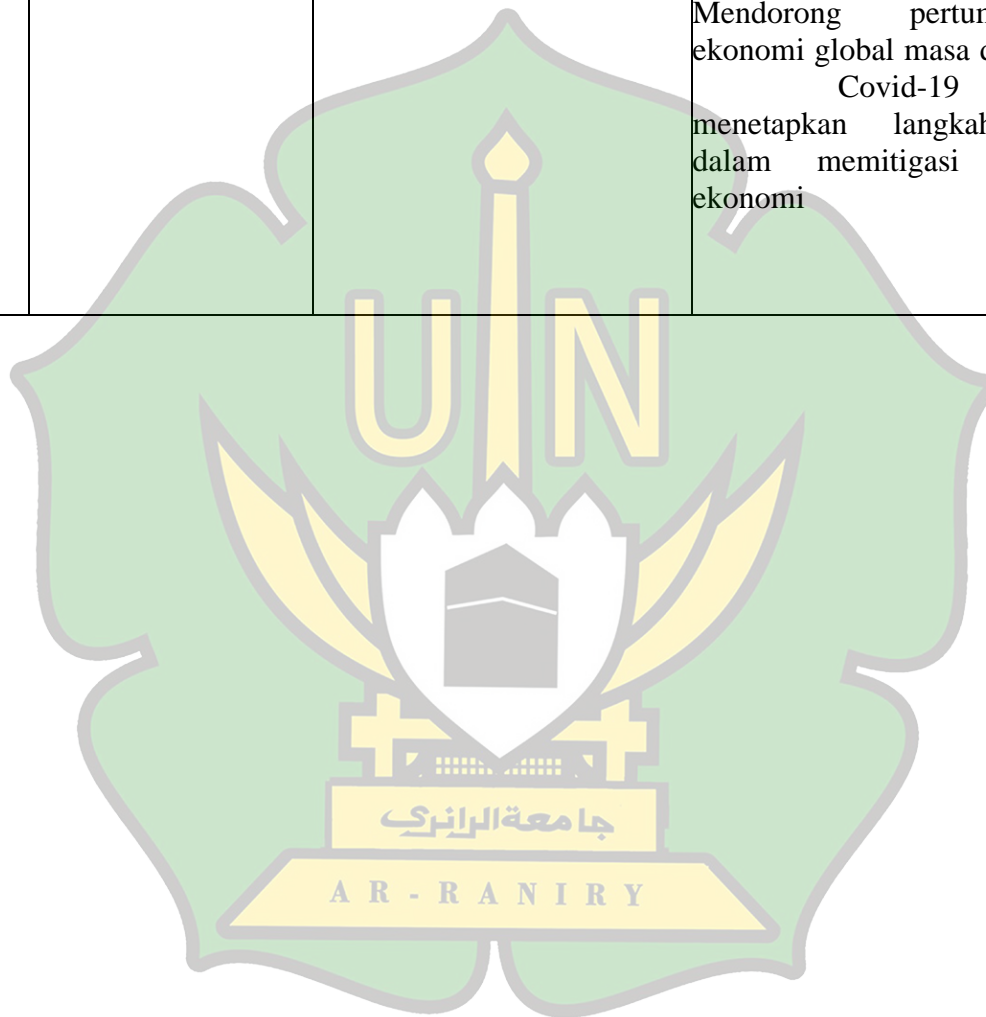
No	Orientasi Kerjasama Multilateral	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
	Bidang keamanan dan perdamaian tahun 2020	Menghapuskan bentuk <i>child trafficking</i> , serta eksploitasi seksual komersial anak (ESKA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan negara-negara ASEAN Indonesia menyumbang 5000 personalia ke misi perdamaian dan pemeliharaan PBB 2. Peningkatan peranan perempuan dalam keamanan dan perdamaian serta isu Palestina di Dewan Keamanan PBB.
	Bidang Kesehatan tahun 2020	Kerja sama dalam bidang kesehatan anak dan perempuan.	Kolaborasi dan collective global leadership dalam menangani pandemic Covid-19.



Lampiran 5. kerjasama Multilateral Indonesia

Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia dengan IMF Sebelum dan Setelah Covid, 19

No	Orientasi Kerjasama Multilateral	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
1	Kesehatan		Mendorong pertumbuhan ekonomi global masa dan pasca Covid-19 dan menetapkan langkah-langkah dalam memitigasi dampak ekonomi



Lampiran 6. kerjasama Multilateral Indonesia

Orientasi Kerjasama Multilateral Indonesia dalam Indo - Pasifik Sebelum dan Setelah Covid, 19

No	Orientasi Kerjasama Multilateral	Sebelum Pandemi Covid-19	Setelah Pandemi Covid-19
1	Kesehatan		Bekerja sama melalui USAID dan CDC dan bekerja sama upaya tanggap Covid-19
2	Keamanan		Mengembalikan warga Indonesia di negara-negara asing yang terpapar Covid-19

